

TAHUN 2023

Laporan Kinerja Biro Perekonomian

BIRO PEREKONOMIAN SETDA

PROVINSI JAMBI

Jln Jend A.Yani nomor 1 Telanaipura Jambi
No. Telp (0741) 60144 No. Faks (0741) -
60400

Email: tu.apsda@gmail.com Kode Pos 36122

Kata Pengantar



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja (Lkj) Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja (Lkj) Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja (Lkj) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2023

Kepala Perekonomian

JOHANSYAH, S.E., M.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19700615 200003 1 003

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Peningkatan nilai tambah sektor perekonomian pada struktur Ekonomi Daerah, Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD, Nilai AKIP dan Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public dengan indikatornya :

1. Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 6,23 %.
2. Persentase sector SDA pada Struktur Ekonomi
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 15,00 %
3. Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 2,03 %.
4. Nilai Akip Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 77,79 %.
5. Sektor IKM Biro Perekonomian
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 81,19 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan perekonomian daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi perekonomian daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar isi

Kata Pengantar		-----	i
Iktisar Eksklusif		-----	ii
Bab I	Pendahuluan	-----	1
	1.1. Struktur Organisasi	-----	2
	1.2. Tugas dan Fungsi	-----	3
	1.3. Isu-isu Strategis	-----	5
	1.4. Keadaan Pegawai	-----	11
	1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	-----	16
	1.6. Keuangan	-----	17
	1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	-----	19
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	-----	21
	2.1. Perencanaan Strategis	-----	21
	2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2022	-----	32
	2.3. Anggaran Tahun 2022	-----	36
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	-----	39
	3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	-----	39
	3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategi	-----	40
	3.3. Realisasi Anggaran	-----	44
	3.4. Instrumen Pendukung	-----	46
Bab IV	Penutup	-----	103
	4.1. Kesimpulan	-----	103
	4.2. Rencana Tindak Lanjut	-----	104

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Fungsi dan Tugas
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-

3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perekonomian Provinsi Jambi
2. Mendorong Biro Perekonomian Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perekonomian Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Perekonomian Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Biro Perekonomian terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 9 (sembilan) Sub bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kebijakan Perekonomian
 - a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro
 - b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bagian SDA Perikanan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - b. Sub Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c. Sub Bagian SDA Energi dan Air
3. Bagian BUMD dan BLUD
 - a. Sub Bagian BUMD Jasa keuangan dan Aneka Usaha
 - b. Sub Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi
 - c. Sub Bagian BLUD

Biro Perekonomian Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perekonomian
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAMBI



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dibidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Perekonomian Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Biro Perekonomian Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan prioritas, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi memerlukan pendanaan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatannya. Namun hakikatnya, program/kegiatan prioritaslah yang harus menyesuaikan kondisi anggaran pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan prioritas karena jika anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi maka program/kegiatan pun tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Perekonomian selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Pembangunan ekonomi Jambi pada tahun 2022 dihadapkan pada beberapa isu strategis yang langsung atau tidak langsung berdampak terhadap perkembangan perekonomian di Jambi sehingga mempengaruhi capaian target makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Sebagai implementasi dari tupoksinya, Biro Perekonomian membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa isu strategis dibidang perekonomian yang berkembang di Provinsi Jambi antara lain meliputi isu dibidang kurangnya infrastruktur, perlambatan pertumbuhan ekonomi, lemahnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan serta pengembangan potensi energi dan sumber daya alam.

Isu yang berkembang di bidang infrastruktur antara lain :

1. Masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi,
2. Terbatasnya akses perhubungan kedaerah,
3. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian.
4. Pembuatan Jalan khusus batu bara

Akibat dari masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi dan terbatasnya akses perhubungan daerah mempengaruhi tingkat perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi. Padahal peranan industri kecil dalam perekonomian daerah sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan perdagangan serta jasa.

Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi juga sangat mempengaruhi taraf perekonomian masyarakat jambi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut khususnya juga akan meningkatkan produksi padi sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

Pembangunan jalan khusus batu bara adalah proyek strategis nasional karena mempunyai berdampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, agar distribusi barang dan jasa pada daerah daerah berpenghasil batu bara, sawit , CPO, dan hasil bumi lainnya menuju pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Dampak lain dari jalan khusus ini adalah berkurangnya kemacetan dan tingkat kecelakaanan dapat teratasi.

Isu yang berkembang di bidang perlambatan pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Perlambatan lapangan usaha,
2. Penurunan kinerja ekspor akibat pemberlakuan lockdown di negara tujuan,
3. Pembatasan sosial yang berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi,
4. Terganggunnya aktivitas di industri pengolahan,
5. Penurunan ekonomi akibat melemahnya daya beli masyarakat
6. Masih rendahnya realisasi belanja Pemerintah (government spending) akibat refocusing anggaran.
7. Kenaikan Inflasi

Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm),
Year to Date(ytd), dan *Year on Year* (yoy)
 Gabungan 2 Kota IHK (Kota Jambi dan Kota Muara Bungo)
 Bulan Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi ytd Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi yoy Desember 2022 (%)	Andil Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Andil Inflasi yoy Desember 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum (<i>Headline</i>)	114,82	0,77	6,35	6,35	0,7700	6,3500
Makanan, Minuman, dan Tembakau	117,92	2,20	6,04	6,04	0,6687	1,8677
Pakaian dan Alas Kaki	106,37	0,04	1,06	1,06	0,0025	0,0710
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	110,91	-0,01	4,44	4,44	-0,0023	0,8193
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	115,67	0,46	6,18	6,18	0,0278	0,3688
Kesehatan	111,96	0,07	0,55	0,55	0,0013	0,0100
Transportasi	125,57	0,27	20,47	20,47	0,0361	2,4025
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,92	-0,13	-0,59	-0,59	-0,0063	-0,0301
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	121,48	0,08	0,51	0,51	0,0015	0,0105
Pendidikan	105,30	0,00	0,58	0,58	0,0000	0,0232
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	109,85	0,01	3,76	3,76	0,0005	0,2636
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,50	0,71	8,75	8,75	0,0450	0,5440

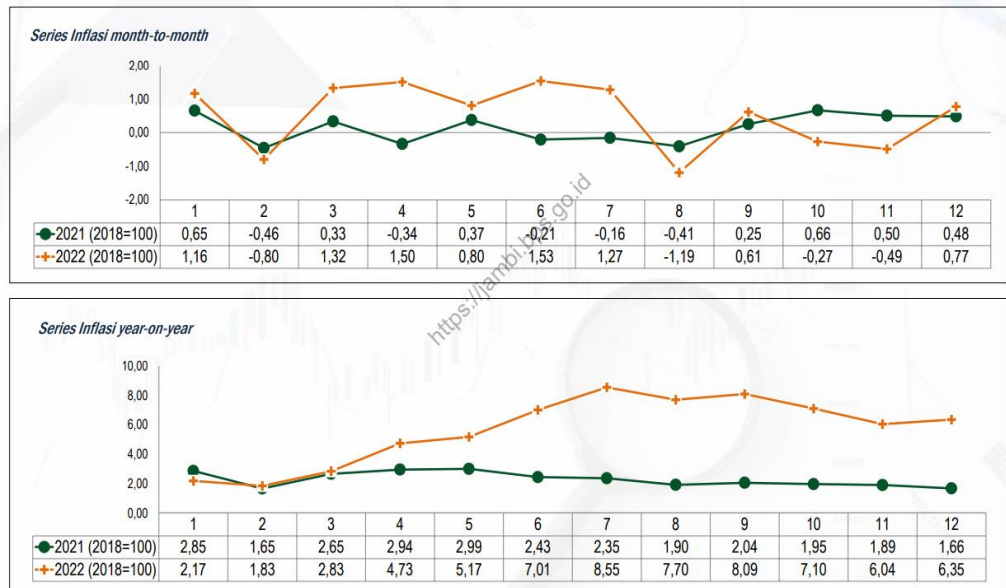
Sumber: Survei Harga Konsumen Kota Jambi dan Kota Muara Bungo, BPS

Berdasarkan rilis data BPS pada Desember 2022, tingkat inflasi *Month to Month* Gabungan 2 Kota IHK (Kota Jambi dan Kota Muara Bungo) yang terbentuk sebesar 0,77 persen, atau terjadi kenaikan indeks dari 113,94 pada November 2022 menjadi 114,82 pada Desember 2022. Tingkat inflasi *Year to Date* dan inflasi *Year on Year* Gabungan 2 Kota IHK sebesar 6,35 persen.

Inflasi *Month to Month* Gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo sebesar 0,77 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada delapan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,20 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,04 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,46 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,27 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,08 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran sebesar 0,01 persen; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,71 persen.

Dalam pembentukan inflasi *Month to Month* Gabungan 2 Kota IHK (Kota Jambi dan Kota Muara Bungo) sebesar 0,77 persen, andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,6687 persen

Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jambi, 2021-2022



Sumber data : Statistik Provinsi Jambi

Dalam pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai upaya salah satunya Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menekan angka inflasi yang terjadi, meskipun ada penurunan yang sebelumnya 8,55 persen menjadi 7,77 persen pada bulan Agustus.

Pertama Provinsi Jambi menggelontorkan dana 1,3 Miliar untuk bantuan 5 komoditas yang menyumbang inflasi, yakni bantuan bibit cabe rawit, cabe merah dan bawang merah, termasuk menekan harga beras dan minyak goreng.

Kemudian yang kedua Provinsi Jambi memaksimalkan musim panen. Melalui Dinas ketahanan pangan perintahkan untuk membeli hasil panen itu, sehingga tidak dijual keluar provinsi.

Kemudian yang ketiga Provinsi Jambi selanjutnya melalui dana Desa/Kelurahan yang diberikan Provinsi Jambi sebesar Rp 100 juta, akan ada beberapa persen yang akan digunakan untuk mengintervensi angka inflasi.

Isu yang berkembang di bidang pengembangan potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi antara lain penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan

kearifan lokal yang luhur. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

Isu yang berkembang di bidang struktur perekonomian Provinsi Jambi masih bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi potensi sumber daya alam meliputi : 1) Sumber Daya Lahan (Hutan, kebun, pertanian dan tambang/galian); 2) Sumber Daya Mineral dan; 3) Sumber daya air dan Kelautan (perikanan, pengairan dan air baku dan air bersih).

Didasari dari hal-hal tersebut diatas, agar pengelolaan sumber daya mineral antara aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resources based economic*) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*) dan upaya meningkatkan rasio desa yang dialiri listrik, maka perlu dirumuskan kebijakan energi daerah dan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jambi.

Begitu juga dengan era reformasi, kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk menuntut hak-hak atas lahan yang sudah digarapnya, sehingga banyak tuntutan baik berupa surat pengaduan maupun berupa aksi massa, untuk pengembalian hak mereka tidak saja di lahan perkebunan juga pada lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dalam hal ini pihak pemerintah provinsi sebagai pihak yang menjadi sasaran tempat pengaduan, sehingga memerlukan berbagai kebijakan untuk dapat menemukan inti permasalahan.

Oleh karena itu dengan menyadari kondisi dan permasalahan serta tantangan tersebut, sangat relevan ada peran Biro Perekonomian kedepannya, dalam rangka untuk dapat menjembatani permasalahan antara pihak yang berkepentingan melalui fungsi Fasilitator, Koordinasi dan Pemantauan.

Dengan Fasilitasi dari Biro Perekonomian melalui kebijakan yang tepat serta manajemen yang benar, efektif dan terkendali diharapkan dapat menghasilkan output yang memiliki daya saing, terencana serta berkelanjutan. Setelah mengetahui arti penting dari peranan Biro Perekonomian, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Instrumen utama yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threat*). Pada pokoknya, teknik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan **faktor internal** (kekuatan dan kelemahan), serta **faktor eksternal** (peluang dan ancaman).

Identifikasi kondisi Internal Biro Perekonomian, diantaranya :

Kekuatan (strengths)

1. Adanya dukungan yang kuat dari Pimpinan (Asisten, Sekda dan Gubernur).
2. Adanya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup.
3. Adanya kewenangan memfasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta mengevaluasi pada bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam.
4. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi.
5. Sarana dan prasarana penunjang kerja cukup memadai.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Masih adanya personil yang kurang menguasai Tupoksinya
2. Mekanisme kerja yang kurang efektif
3. Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi yang cenderung rendah.
4. Anggaran penunjang Tupoksi terbatas.

Identifikasi kondisi eksternal Biro Perekonomian antara lain :

Peluang (Opportunities)

1. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup memadai.
2. Adanya kerjasama dengan unit kerja terkait.
3. Upaya peningkatan kompetensi SDA aparatur di daerah yang cukup besar.
4. Adanya informasi / data perekonomian yang mudah diakses.

Ancaman (Threat)

1. Belum optimalnya koordinasi antar dinas/instansi terkait
2. Produk/hasil fasilitasi permasalahan belum dapat memuaskan stake holders
3. Perubahan kebijakan pemerintah
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
5. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan

1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Perekonomian Provinsi Jambi yaitu membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 29 pegawai yang terdiri 13 pejabat struktural dan 16 fungsional umum yang terbagi di Instansi Induk Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi .

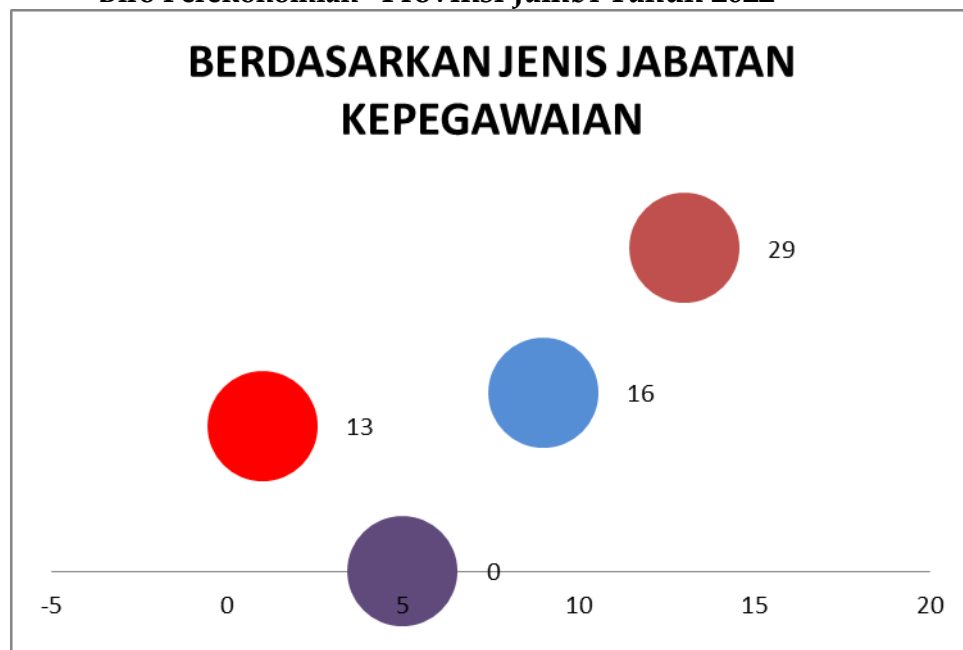
Pada Tabel dan Grafik berikut disajikan kondisi Sumber Daya Manusia aparatur Biro
Perekonomian Setda Provinsi Jambi :

1.4.1. Berdasarkan Jenis Jabatan Kepegawaian

N O	SKPD	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			TOTAL
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	5	6
	BIRO PEREKONOMIAN	13	0	16	29

Sumber data : Biro Perekonomian 2022

**Gambar 1.4.2 Grafik Kepegawaian berdasar Jenis Jabatan Kepegawaian
Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022**



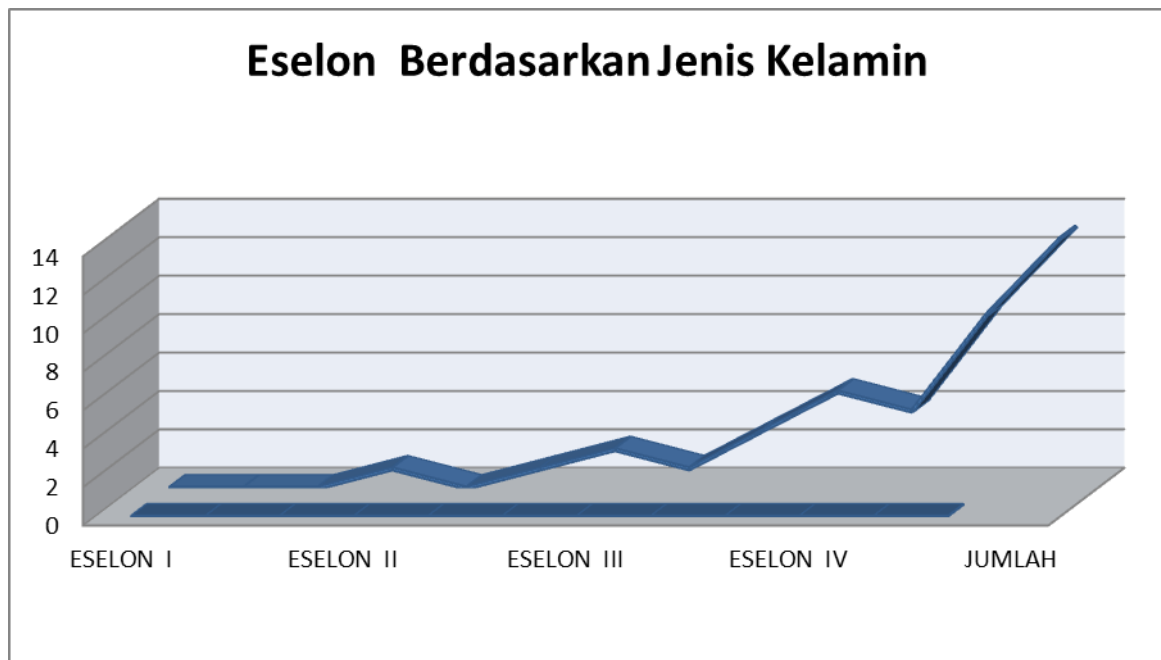
Berdasarkan grafik ini dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Biro Perekonomian Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Biro Perekonomian sebagian besar merupakan pegawai Golongan III. Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Biro Perekonomian Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.4.3 Tabel Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO	SKPD	ESELON I			ESELON II			ESELON III			ESELON IV			JUMLAH
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BIRO PEREKONOMIAN	0	0	0	1	0	1	2	1	3	5	4	9	13
TOTAL		0	0	0	1	0	1	2	1	3	5	4	9	13

Sumber data : Biro Perekonomian 2022

Gambar 1.4.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022



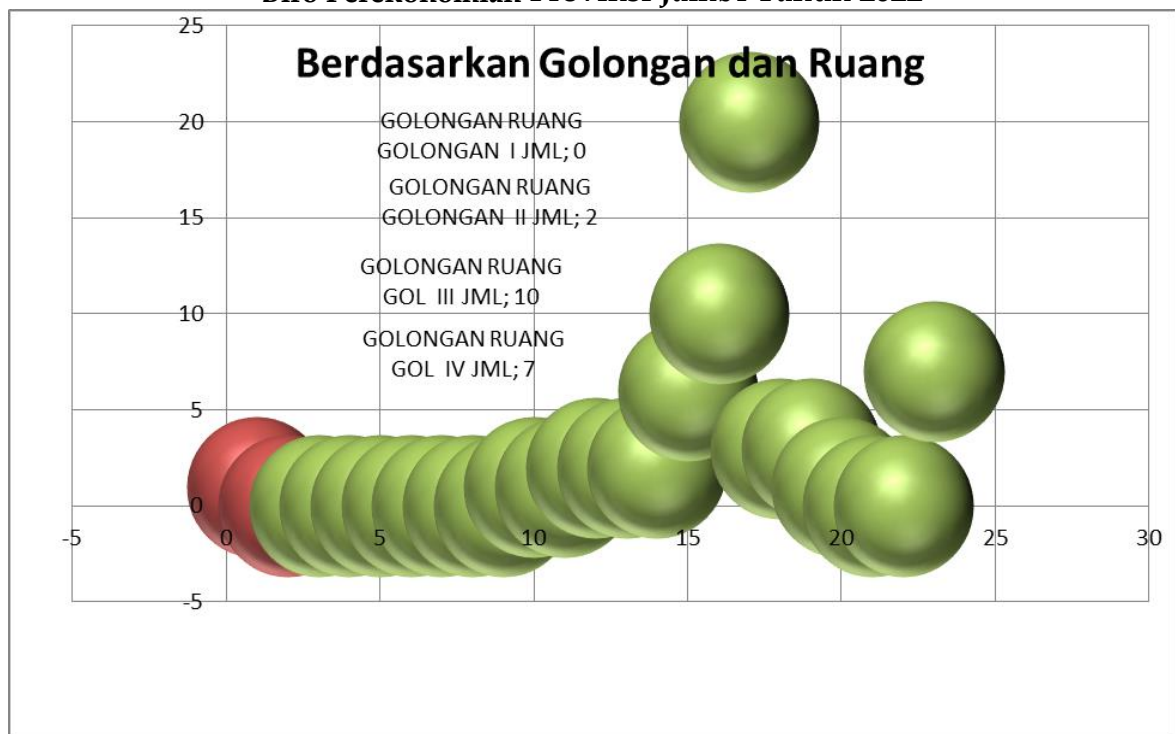
Sumber data : Biro Perekonomian 2022

**Gambar 1.4.5 Tabel Berdasarkan Golongan dan Ruang Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jambi Tahun 2022**

N O	SKPD	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH	
		GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV						
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	e		JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BIRO PRKM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	6	10	20	5	1	1	0	0	7	29
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	6	10	20	5	1	1	0	0	7	29

Sumber data : Biro Perekonomian 2022

**Gambar 1.4.6. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Ruang
Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022**



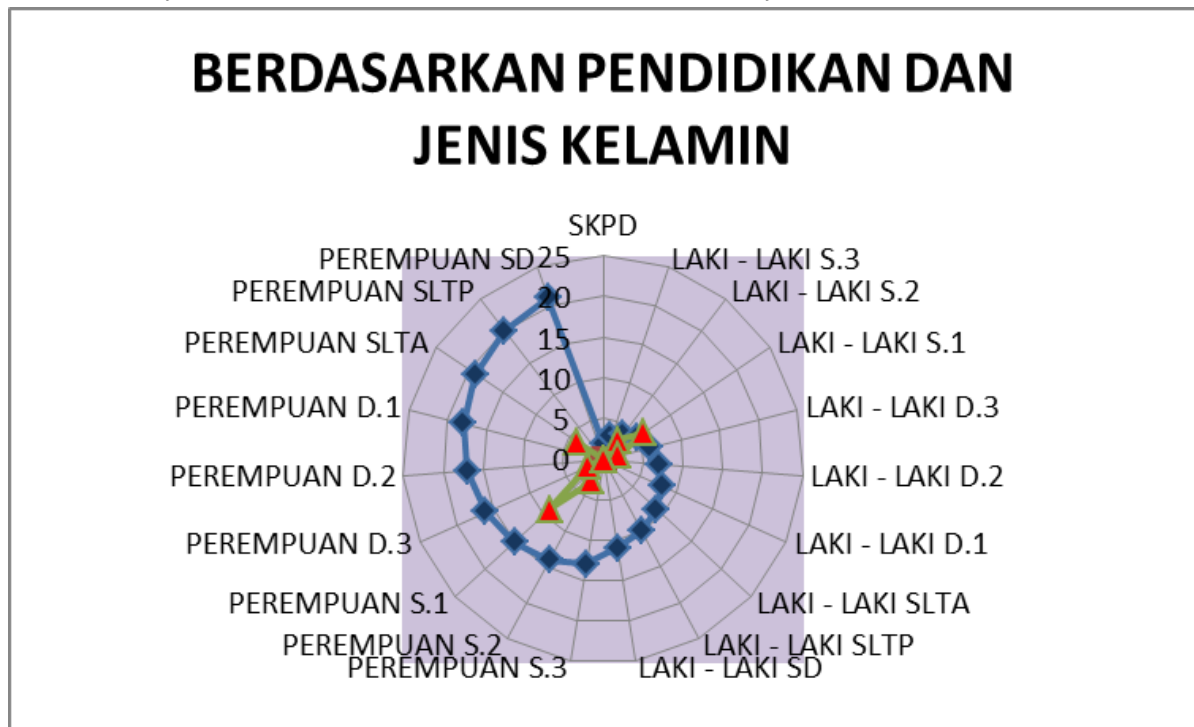
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi pegawai di Biro Perekonomian Provinsi Jambi berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 10 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang yang berarti sebagian besar pegawai berpangkat golongan III, selanjutnya bila berdasarkan jenjang pendidikan komposisi pegawai dapat dilihat pada gambar berikut :

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	SKPD	LAKI - LAKI									JML	PEREMPUAN									JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BIRO PEREKONOMIAN	0	3	6	2	0	0	0	0	0	11	0	3	9	2	0	0	4	0	0	18	29
TOTAL		0	3	6	2	0	0	0	0	0	11	0	3	9	2	0	0	4	0	0	18	29

Sumber data : Biro Perekonomian 2022

Gambar 1.4.7. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Biro Perekonomian Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 sebanyak 15 orang dan Sarjana S2 sebanyak 6 orang.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Biro Perekonomian Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Biro Perekonomian Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5.1 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar		Tidak Ada
2	Alat-alat angkutan	4 Mobil 6 Motor	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga		Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi		Tidak Ada
5	Bangunan gedung		Baik
6	Jaringan		Baik
7	Buku perpustakaan		Tidak Ada

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Tahun Anggaran 2022 Biro Perekonomian Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp 2.191.948.893,- (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), penambahan pagu pada anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 2.491.948.893,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang diperuntukkan baik untuk program utama dan program pendukung yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program, yang didukung oleh 2 program, 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yaitu :

I. Program Administrasi Umum

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3 Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

- 1.1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
- 1.2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

- 2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- 2.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- 2.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

- 3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
- 3.2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah, dan Sanitasi
- 3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.7.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Biro Perekonomian, yaitu :
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dalam peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi

1.7.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan nilai tambah sektor Perkonomi pada Struktur Ekonomi Daerah.
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

1.7.3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Fungsi dan Tugas
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2023
- 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023
- 2.4. Intrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.3. Anggaran Tahun 2021
- 2.4. Instrumen Pendukung

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023, Biro Perekonomian Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Renstra Biro Perekonomian Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Biro Perekonomian Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya 2021-2026 Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan tema “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT” . Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian

proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD
Provinsi Jambi 2021-2026**

Visi: TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip
					Indeks Pengelola Keuangan Daerah
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Skor Tingkat kematangan perangkat daerah Provinsi Jambi
					Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan(ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industry pengeloaan	Kontribusi industry pengelolaan terhadap PDRB
				Meningkatnya peran sector pariwisata serta industry kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio Elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet
			Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indek kualitas lingkungan hidup
					Penurunan emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan(GRK) (jutaton CO2 eq)
				Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
				Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks ketahanan pangan
	Memantapkan kualitas Sumber daya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat,	Indek pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan hidup

		berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender		Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indek kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indek pemberdayaan gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian sasaran dengan upaya meningkatkan koordinasi terhadap dinas/instansi provinsi, kabupaten dan kota. Disamping itu juga, diarahkan pada berbagai kegiatan penciptaan model dan pola pengembangan dari prioritas pembangunan Provinsi Jambi

Penjabaran Program dan Kegiatan dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian untuk mencapai Visi dan Misi biro, dalam meningkatkan kinerja aparatur yang ada. Berkaitan dengan itu, dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang dikelola Biro Perekonomian diarahkan pada tupoksi masing-masing bagian yang besarnya disesuaikan dengan intensitas dan beban kerja masing-masing bagian, agar pencapaian visi dan misi lebih optimal

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti tabel berikut :

Tabel 2.1.2.1. Sasaran Strategis Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
		PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Akip/Predikat Akip Skor IKM Biro Perekonomian		B	B	BB	BB	BB	A	A	
						80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		428.239.850	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	79.482.250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						52.403.000	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	Biro Perekonomian
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						19.150.000	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						7.929.250	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	Biro Perekonomian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran								
						348.757.600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.711.000	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	Biro Perekonomian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38.030.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Biro Perekonomian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25.973.860	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Biro Perekonomian
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58.042.740	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi				295.760.000	4,80%	5,00%	5,00%	5,50%	5,50%	5,50%	
		Persentase Sektor SDA pada Struktur Ekonomi				399.559.450	27%	30%	35%	35%	35%	35%	

		Perekonomian dan Pembangunan		Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan									
						1.388.760.040	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
			Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentasi percepatan kebijakan masalah perekonomian	295.760.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	126.980.000	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	168.780.000	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Biro Perekonomian
			Pengelola kebijakan koordinasi SDA		Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA	399.559.450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	142.692.700	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	146.066.750	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	110.800.000	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Biro Perekonomian
	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan				693.440.590	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
			Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD		Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD	693.440.590							Biro Perekonomian

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	155.840.000	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	426.800.590	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	110.800.000	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	Biro Perekonomian

Jambi, Januari 2023

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan peningkatan kinerja birokrasi dengan melakukan pembenahan sistem manajemen administrasi perekonomian dan sumber daya alam melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi melalui penguasaan teknologi informasi/komputer, serta adanya koordinasi yang solid antar instansi terkait dalam penyediaan data guna menyusun langkah kebijakan yang tepat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan lintas sektoral dalam memantau pelaksanaan program kegiatan bidang ekonomi Provinsi Jambi.
3. Pelaksanaan kegiatan harus tertib secara administrasi dan berbasis efisiensi dan efektif baik dari sumber daya manusia dari sumber dana yang ada.
4. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lingkungan.
5. Meningkatkan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi BUMD dan BLUD
6. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Bintek yang sesuai dengan TUPOKSI, baik dalam Provinsi Jambi maupun yang diadakan oleh Departemen yang membidangnya.

Dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1.3.2. Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Biro Perekonomian Setda
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2		3
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase sektor ekonomi pada pertumbuhan ekonomi
			Persentase sektor SDA pada struktur ekonomi
2		Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan
3		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akip
			Skor IKM Biro Perekonomian

Sumber data : Biro Perekonomian 2022

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi	4,80%
		Persentase sektor SDA pada Struktur ekonomi	27%
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan	70%
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akip	B (78 %)
		Skor IKM Biro Perekonomian	80.00

Sumber data : Biro Perekonomian 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **JOHANSYAH, S.E, M.E**

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. SUDIRMAN. S.H., M.H**

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

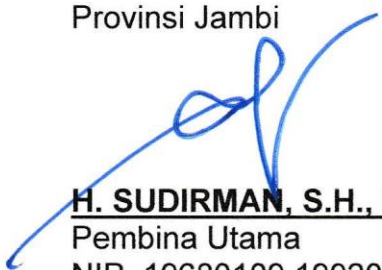
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah
Provinsi Jambi


H. SUDIRMAN, S.H., M.H
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002

Pihak Pertama
Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jambi,

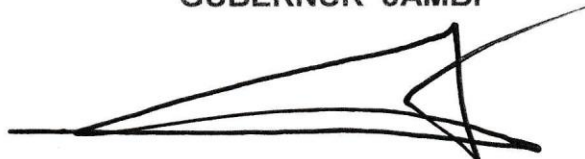

JOHANSYAH, S.E, M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19700615 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan nilai tambah sektor Perkonomi pada Struktur Ekonomi Daerah	- Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi	4,80%
		- Persentase sektor SDA pada Struktur ekonomi	27%
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	- Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan	70%
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	- Nilai Akip	B
		- Skor IKM Biro Perekonomian	80.00

PROGRAM	ANGGARAN
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	405.224.243
II. Perekonomian dan Pembangunan	1.786.724.650
Jumlah	Rp. 2.191.948.893

Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H

Jambi, Januari 2022

Pihak Pertama
Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jambi,



JOHANSYAH, S.E., M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19700615 200003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOHANSYAH,S.E.,M.E**

Jabatan : **Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUDIRMAN,S.H.,M.H.**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.SUDIRMAN,S.H.,M.H.
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002

Jambi, Januari 2023

Pihak Pertama,

JOHANSYAH,S.E.,M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi	4,80%
		Persentase sektor SDA pada Struktur ekonomi	27%
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan	70%
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akip	B (78 %)
		Skor IKM Biro Perekonomian	80.00

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 330.454.927	APBD
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.459.603.550	APBD

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.SUDIRMAN,S.H.,M.H.

Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002

JOHANSYAH,S.E.,M.E

Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 200003 1 003

2.3 Anggaran

Tahun Anggaran 2022 Biro Perekonomian Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp 2.191.948.893,- (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), penambahan pagu pada anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 2.491.948.893,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

2.3.1 Target Belanja Biro Perekonomian Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 2.491.948.893,- dengan rincian sebagai berikut ;

Kode Reg	Uraian	Jumlah
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	Rp. 203.040.000,-
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.288.908.890,-
Total		Rp. 2.491.984.893,-

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Biro Perekonomian Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Biro Perekonomian

**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Biro perekonomian Tahun 2022**

PerSubKegiatan

NO	SASARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PRESENTASE	KETERANGAN
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	34.196.215	95,53%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		10.848.000	99,91%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		6.496.000	96,49%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		68.914.730	99,36%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		20.325.000	99,83%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		25.850.884	98,88%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		287.313.464	97,73%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	286.304.343	97,36%	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
		160.197.409	95,70%	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		326.877.590	90,10%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
		147.725.050	97,64%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

		211.214.212	95,27%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	464.095.564	86,56%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
		140.556.532	99,83%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
		152.272.900	98,57%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

PerKegiatan

SASARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PRESENTASE	KETERANGAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	51.540.215	96,54%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	333.489.348	97,95%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	446.501.752	96,75%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
	685.816.852	93,21%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	756.924.996	91,04%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

BAB 3

Bab 3 berisi :

Evaluasi dan Analisis

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

3.3 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 Biro Perekonomian Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Perekonomian Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Perekonomian Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase sektor ekonomi pada pertumbuhan ekonomi	Persen	4,80%	0,77%	6,23%	Merah
		Persentase sektor SDA	Persen	27%	1,8 %	15,00%	Merah
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan	Persen	70%	34,50%	2,03%	Merah
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akip	Sekor/ nilai	B	77,79%	77,79%	Hijau Muda
		Skor IKM Biro Perekonomian		80%	81,19%	0,99%	Hijau Muda
			Persen				

Sumber data : Biro Perekonomian 2022

Biro Perekonomian Provinsi Jambi memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Biro Perekonomian Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut mengalami kendala dari target yang ditetapkan (**tercapai $\geq 100\%$**) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Biro Perekonomian Provinsi Jambi rata-rata mengalami penurunan Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD, dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerjanya yakni

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran #2: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerjanya yakni

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
3. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
4. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Sasaran #3: Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro, dengan indikator kinerjanya yakni

1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Sasaran #4 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, dengan indikator kinerjanya yakni

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Sasaran #4 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan, dengan indikator kinerjanya yakni

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air minum, Limbah dan Sanitase
3. Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi

Sasaran ini dicapai melalui 2 program 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan

I. Program Administrasi Umum

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. Program Perekonomian dan Pembangunan

3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 3.8 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 3.9 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 4.10 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

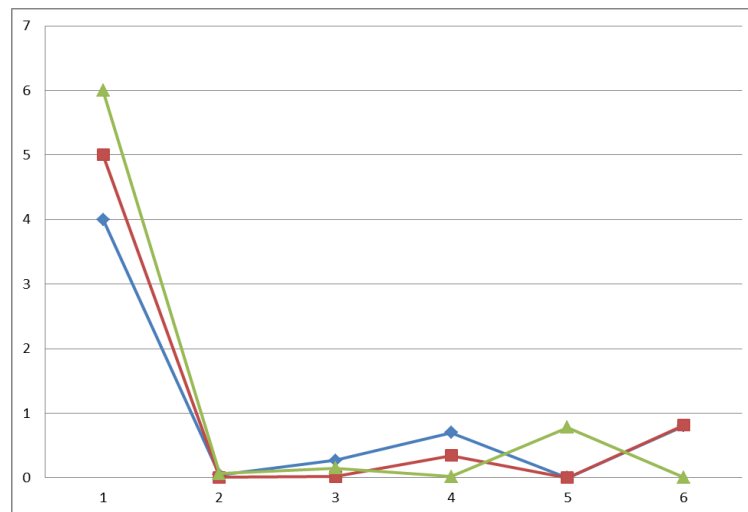
- 4.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- 4.12 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
5. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
- 5.13 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
- 5.14 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah, dan Sanitasi
- 5.15 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	tahun 2022			2023
			Target	Realisasi	% Capaian	target
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase sektor ekonomi pada pertumbuhan ekonomi	4,80%	0,77%	6,23%	4,80%
		Persentase sektor SDA pada struktur ekonomi	27%	1,8%	15,00%	27%
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan	70%	34,50%	2,03%	70%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akip	B	B (77,79%)	77,79%	B (78 %)
		Skor IKM Biro Perekonomian	80%	81,19%	0,99%	80.00

3.2.3. Grafik CAPAIAN KINERJA 2021 BIRO PEREKONOMIAN



3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp 2.343.187.893,- (94,03%) dari total anggaran yang dialokasikan Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 1.889.243.600,- (93,67%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 453.944.293 (97,95%),. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp 0. (0%);
2. APBD Belanja langsung sebesar 2.343.187.893,- (94,03%)
3. APBN sebesar Rp 0 (0%) .

Realisasi anggaran yang dikelola Biro Perekonomian Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp 1.889.243.600,- (93,67%), dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp 1.786.724.650 (100%),
2. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp 453.944.293 (97,95%), dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 405.224.243 (100%);
3. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 0(0.%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 0,-

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022

PerKegiatan

SASARAN	ANGGARAN (Rp)	PRESENTASE	KETERANGAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	51.540.215	96,54%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	402.404.078	98,34%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	446.501.752	96,75%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
	685.816.852	93,21%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	756.924.996	91,04%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Anggaran Sasaran Strategis Biro Perekonomian Provinsi Jambi

PerSubKegiatan

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE	KETERANGAN
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	35.797.000	34.196.215	95,53%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		10.857.900	10.848.000	99,91%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		6.732.033	6.496.000	96,49%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		69.355.840	68.914.730	99,36%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		20.360.000	20.325.000	99,83%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		26.144.070	25.850.884	98,88%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		293.977.400	287.313.464	97,73%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	294.080.100	286.304.343	97,36%	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
		167.400.000	160.197.409	95,70%	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		362.797.050	326.877.590	90,10%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

		151.299.800	147.725.050	97,64%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		221.696.800	211.214.212	95,27%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	536.166.300	464.095.564	86,56%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
		140.799.800	140.556.532	99,83%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
		154.484.800	152.272.900	98,57%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

3.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Biro Perekonomian Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Instrumen pendukung Biro Perekonomian antara lain :

1. Kegiatan Analisis Ekonomi Makro

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan

dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 Km² terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,69%)
2. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,31%)
3. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,33%)
4. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,57%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,62%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 Km² (10,85%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 Km² (9,27%)
8. Kabupaten Tebo 6.461 Km² (12,88%)
9. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,29%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

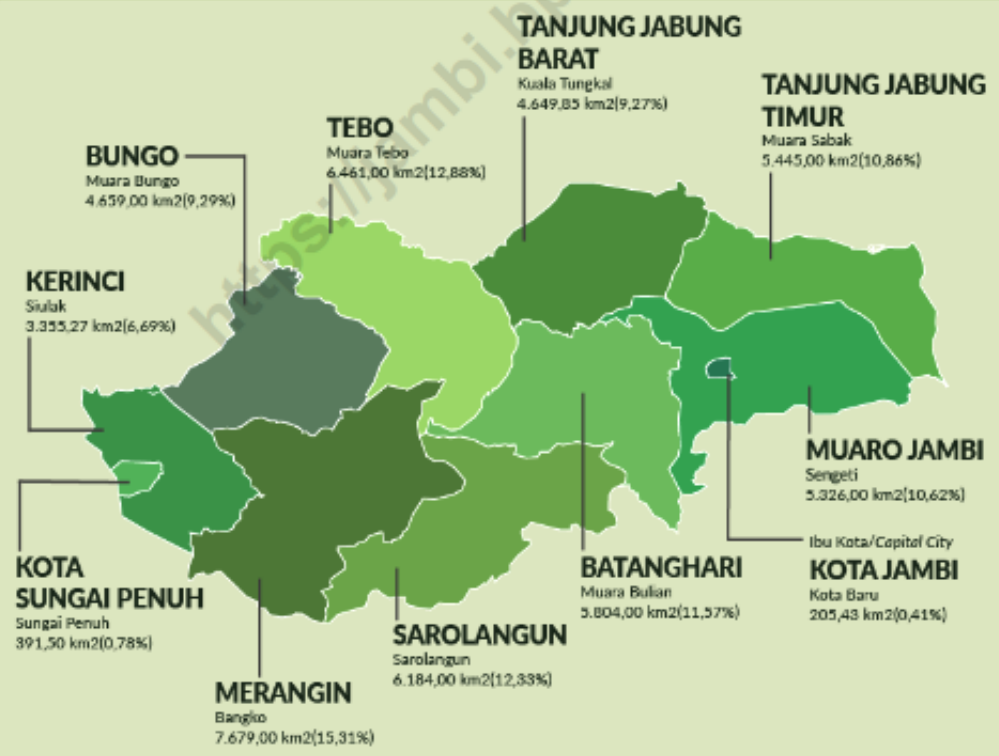
Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing - masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184 Km². Pengamatan Unsur Iklim diamati melalui Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Muaro Jambi. Rata-rata suhu udara adalah 27,2 derajat celcius di tahun 2021. Suhu minimum adalah 21,6 derajat celcius, lebih rendah dibanding dengan suhu pada tahun 2020 yaitu 22,0 derajat celcius. Suhu maksimum 34,8 derajat celcius. Tekanan udara menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1.007,6 mb dengan range 1.001,1 mb sampai dengan 1.012,7 mb.



Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan tersebar menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.

Jambi Province geographically, is located between 00 45' to 20 45' south latitude and 1010 10' to 1040 55' east longitude. The area of Jambi Province is 53.435 km² consist of land area 50.160,05 km² that consists of 9 regencies and 2 cities.

LUAS WILAYAH MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI Total Area of Regency/Municipality in Jambi Province



Stasiun BMKG	Suhu/Temperature(°C)			Kelembaban/Humidity(%)			Kecepatan Angin (m/det) /Wind Velocity (m/det)		
	Min	Rata-rata/ Average	Max	Min	Rata-rata/ Average	Max	Min	Rata-rata/ Average	Max
Klimatologi Muara Jambi	21,60	27,20	34,80	48,00	85,90	99,00	calm	1,40	30,00

Secara makro kondisi ekonomi Provinsi Jambi, cukup berfluktuatif yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kondisi pandemi masih menghantui pergerakan ekonomi di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi masih berada pada angka (-0,44) dan pada tahun 2021 mampu mencapai angka 3,66. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh semua sektor ekonomi, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dari 7,97 pada September 2020 dan menjadi 7,67

di September 2021. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami peningkatan dari 71,29 pada tahun 2020 menjadi 71,63 ditahun 2021.

Provinsi Jambi dalam melaksanakan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berjalan sebagaimana ketentuan dan tidak menimbulkan pengkotakan dan konflik yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan dan investasi daerah. Kondisi ini cukup bersinergi sehingga tidak menimbulkan gejolak antara Kabupaten/Kota maupun gejolak dari masyarakat yang mengarah disintegrasi. Hal ini merupakan gambaran dari wujud kebersamaan antara aparat pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh komponen lapisan masyarakat termasuk organisasi sosial kemasyarakatan maupun peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dalam proses pembangunan, sehingga minat investor ke Provinsi Jambi mengalami peningkatan cukup signifikan. Realisasi investasi Provinsi Jambi pada tahun 2021 mencapai angka Rp. 6,9 trilyun dari Rp.4,2 trilyun di tahun 2020.

a) Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi

No	Triwulan	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)
1.	Triwulan I	4,40	0,33	4,64
2.	Triwulan II	0,33	10,33	5,41
3.	Triwulan III	98,96	5,91	5,15
4.	Triwulan IV	0,324	3,62	

b) Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi

DAERAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			JUMLAH PENDUDUK MISKIN		
	MARET 2020	SEPTEMBER 2020	MARET 2021	MARET 2020	SEPTEMBER 2020	MARET 2021
Kota	10,41	11,22	11,52	123,64	132,60	137,24
Perdesaan	6,23	6,40	6,42	154,16	155,50	156,61
Total	7,58	7,97	8,09	277,80	288,10	293,86

c) Perkembangan Inflasi bulanan di Provinsi Jambi

No	Bulan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Kota	Bungo	Provinsi Jambi (Gabungan)	Kota	Bungo	Provinsi Jambi (Gabungan)
1	Januari	Inflasi 0,68 %	Inflasi 0,50 %	Inflasi 0,65 %	Inflasi 1,13 %	Inflasi 1,39 %	Inflasi 1,16 %
2	Februari	Deflasi 0,47 %	Deflasi 0,46 %	Deflasi 0,46 %	Deflasi 0,85 %	Deflasi 0,38 %	Deflasi 0,80 %
3	Maret	Inflasi 0,33 %	Inflasi 0,35 %	Inflasi 0,33 %	Inflasi 1,35 %	Inflasi 1,10 %	Inflasi 1,32 %
4	April	Deflasi 0,35 %	Deflasi 0,26 %	Deflasi 0,34 %	Inflasi 1,53 %	Inflasi 1,25 %	Inflasi 1,50 %
5	Mei	Inflasi 0,39 %	Inflasi 0,21 %	Inflasi 0,37 %	Inflasi 0,78 %	Inflasi 0,91 %	Inflasi 0,80 %
6	Juni	Deflasi 0,20 %	Deflasi 0,39 %	Deflasi 0,21 %	Inflasi 1,55 %	Inflasi 1,43 %	Inflasi 1,53 %
7	Juli	Deflasi 0,21 %	Inflasi 0,20 %	Deflasi 0,16 %	Inflasi 1,30 %	Inflasi 1,05 %	Inflasi 1,27 %
8	Agustus	Deflasi 0,44 %	Deflasi 0,20 %	Deflasi 0,41 %	Deflasi 1,16 %	Deflasi 1,44 %	Deflasi 1,19 %
9	September	Inflasi 0,30%	Deflasi 0,12 %	Inflasi 0,25%	Inflasi 0,50%	Inflasi 1,10 %	Inflasi 0,61%
10	Oktober	Inflasi 0,65%	Inflasi 0,78%	Inflasi 0,66%	Deflasi 0,16%	Deflasi 1,14%	Deflasi 0,27%
11	November	Inflasi 0,49%	Inflasi 0,60%	Inflasi 0,50%	Deflasi 0,55%	Deflasi 0,02%	Deflasi 0,49%
12	Desember	Inflasi 0,48%	Inflasi 0,45%	Inflasi 0,48%	Inflasi 0,79%	Inflasi 0,68 %	Inflasi 0,77%

d) Gini Ratio Provinsi Jambi

No	BULAN	TAHUN	REALISASI
1	Maret	2021	0,351
2	September	2021	0,315
3	Maret	2022	0,320
4	September	2022	-

e) Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2022

No	Bulan	Realisasi	Keterangan				
			NTPP (Tanaman Pangan)	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
1	Januari	139,10 (0,22%)	99,27	93,20	150,65	100,28	111,01
2	Februari	140,12 (0,73%)	99,12	98,09	151,71	98,42	110,79
3	Maret	142,38 (1,62%)	97,38	102,24	154,61	98,75	110,19
4	April	143,87 (1,04%)	95,44	97,57	157,04	100,25	111,92
5	Mei	131,50 (8,60%)	95,25	97,35	141,06	101,71	112,13
6	Juni	127,31 (3,18%)	95,07	114,83	134,54	100,04	110,17

7	Juli	119,74 (5,95%)	94,14	122,58	124,40	99,50	109,40
8	Agustus	129,58 (8,21%)	98,03	116,15	136,93	99,82	109,88
9	September	133,23 (2,82%)	100,31	114,76	141,50	98,05	108,65
10	Oktober	136,29 (2,30%)	103,75	107,30	145,51	97,56	109,62
11	November	137,94 (1,21%)	102,81	101,34	148,19	97,45	109,03
12	Desember	140,63 (1,95%)	102,96	105,46	151,31	97,68	109,62

f) Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	BULAN	EKSPOR		IMPOR	
		PERSEN	REALISASI	PERSEN	REALISASI
1	Januari	21,69 %	US\$ 186,85 Juta	42,97 %	US\$ 1,77 Juta
2	Februari	6,86 %	US\$ 174,03 Juta	66,88 %	US\$ 2,96 Juta
3	Maret	58,35 %	US\$ 275,58 Juta	95,55 %	US\$ 5,79 Juta
4	April	15,26 %	US\$ 233,52 Juta	60,14 %	US\$ 2,31 Juta
5	Mei	9,40 %	US\$ 255,46 Juta	45,35 %	US\$ 1,26 Juta
6	Juni	20,74 %	US\$ 308,45 Juta	183,42 %	US\$ 3,57 Juta
7	Juli	11,12 %	US\$ 274,16 Juta	42,06 %	US\$ 2,07 Juta
8	Agustus	13,97 %	US\$ 312,46 Juta	60,53 %	US\$ 3,32 Juta
9	September	15,27 %	US\$ 264,75 Juta	33,73 %	US\$ 4,44 Juta
10	Oktober	13,47 %	US\$ 229,10 Juta	50,81 %	US\$ 2,19 Juta
11	November	4,61 %	US\$ 218,54 Juta	77,16 %	US\$ 3,87 Juta
12	Desember				

g) Perkembangan Statistik Perhotelan di Provinsi Jambi

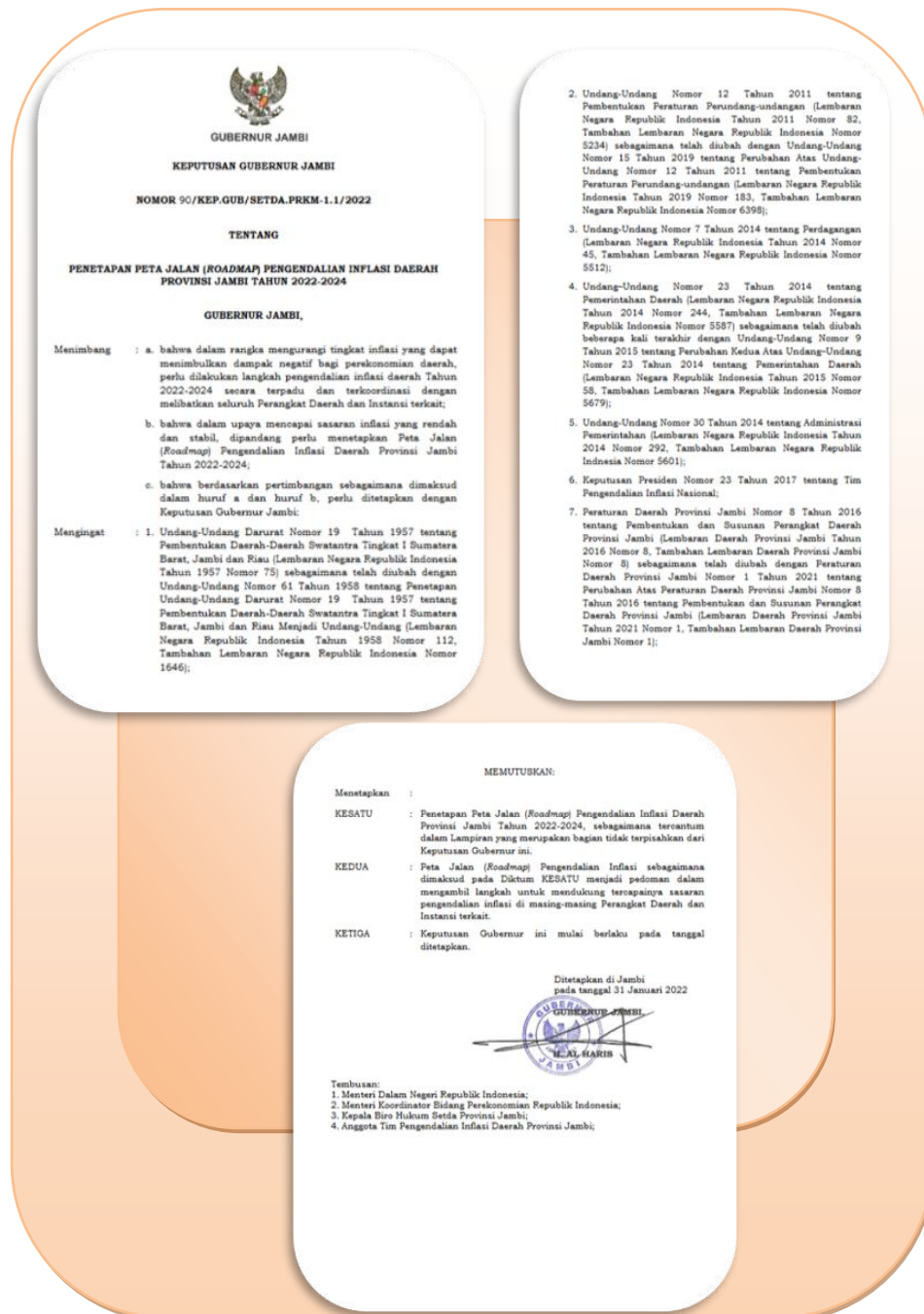
NO	BULAN	JUMLAH TAMU MENGINAP DI HOTEL BERBINTANG	TINGKAT PENGHUNI KAMAR	LAMA MENGINAP
1	Januari	37.953 Orang (19,49 %)	37,88 %	1,47 hari
2	Februari	34.406 Orang (9,35 %)	36,38 %	1,30 hari
3	Maret	57.346 Orang (66,67 %)	43,63 %	1,35 hari
4	April	36.688 Orang (36,02 %)	38,09 %	1,40 hari
5	Mei	54.645 Orang (48,95 %)	48,28 %	1,39 hari
6	Juni	53.195 Orang (2,65 %)	50,95 %	1,45 hari
7	Juli	53.860 Orang (1,25 %)	52,23 %	1,50 hari
8	Agustus	49.143 Orang (8,76 %)	47,97 %	1,55 hari
9	September	50.446 Orang (2,65 %)	54,07 %	1,68 hari
10	Oktober	52.238 Orang (11,48 %)	56,62 %	1,89 hari
11	November	56.067 Orang (0,30 %)	58,31 %	1,71 hari
12	Desember			

a. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi

1) Tugas TPID Provinsi Jambi :

- mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta jasa pada tingkat Provinsi Jambi;
- menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Provinsi;
- melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan
- melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi.

- 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi telah menyusun Roadmap TPID tahun 2022-2024 yang di tandatangai Gubernur Jambi :



- 3) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada kegiatan Analisis Ekonomi Makro bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi Tahun 2022, tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi, dengan hasil rapat sebagai berikut :
- Rapat Koordinasi TPID Provinsi Jambi Tahun 2022 di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (H. Sudirman, S.H., M.H) selaku Ketua Harian TPID Provinsi Jambi, Rakor tersebut dihadiri oleh TPID Provinsi Jambi dan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi.
 - TPID Provinsi Provinsi Jambi mengundang Ibu Nyimas Dwi Koryati, SE.MSi (Analisis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Substansi Perindustrian dan Perdagangan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) sebagai Narasumber, dengan tema “Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah”, kemudian di pandu oleh Bapak Ir. Agus Sunaryo, M.Si (Kepala Bappeda Provinsi Jambi) sebagai Moderator dan didampingi oleh Bapak Ariansyah (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan).
 - Rakor TPID Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 500/1086/Bangda, tanggal 15 Februari 2022 perihal Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Tahun 2021, dimana pada intinya akan dilakukan penilaian dan evaluasi kinerja TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi selama Tahun 2021.
 - Sebagai Narasumber adalah Ibu Nyimas Dwi Koryati, SE.MSi (Analisis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Substansi Perindustrian dan Perdagangan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) yang memberikan materi mengenai kisi-kisi penilaian kinerja TPID Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022.
 - Rapat Koordinasi TPID Provinsi Jambi Tahun 202 juga difokuskan dalam rangka koordinasi menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 dan persiapan penyusunan Laporan kinerja TPID Tahun 2021. Sebagai upaya menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Satgas Pangan masing-masing Kota/kabupaten di Provinsi Jambi.
 - Arahan Ibu Nyimas Dwi Koryati, SE.MSi selaku Narasumber yaitu :
 - Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Pangan
 - Perlu dilakukan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.
 - Mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan dapat naik kelas
 - Meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

- Langkah Strategis Pengendalian Inflasi 2022 :
 - Menjaga Inflasi Volatile Food dalam kisaran 3,0% - 5,0%
 - Memperkuat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
 - Memperkuat Sinergi antar K/L dengan dukungan Pemerintah Daerah
 - Memperkuat Ketahanan Pangan
 - Menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen atau bahan untuk TPID Award, yaitu :
 - Tertib dalam mendokumentasikan kegiatan
 - Pelaporan Rutin Laporan Triwulanan
 - Ketepatan waktu
 - Terdapat arah yang jelas/spesifik pada setiap penyelenggaraan kegiatan (rakor, capacity building, studi banding)
 - Rekomendasi yang dihasilkan (dari Rakor, HLM, Studi Banding) ditindaklanjuti
 - Tersedianya analisis inflasi secara rutin yang dijadikan landasan pembahasan setiap rakor
 - Keterlibatan pihak-pihak yang dapat mendukung program pengendalian inflasi
 - Pemantauan harga secara harian dengan memanfaatkan sistem informasi
 - Melanjutkan kerjasama dengan BPS dalam perhitungan inflasi
 - Kesesuaian latar belakang pemilihan program dengan masalah penyebab inflasi
 - Kesesuaian program dengan karakteristik inflasi daerahnya
 - Bersifat struktural (tidak mengutamakan kegiatan yg sifatnya korektif; seperti Operasi pasar atau pasar murah)
 - Ada indikator untuk menilai efektifitas program unggulan
 - Implementasi (aksi nyata) dari Roadmap.
 - Efektif dan efisien dlm menyelesaikan masalah.
 - Terprogram dalam dokumen perencanaan & pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD)
 - Dukungan Pembiayaan yang cukup
- Dalam antisipasi ketersediaan stok dan stabilitas menjelang Bulan Suci Ramadha dan hari Raya Idul Fitri, TPID dan Satgas Pangan untuk melakukan penjadwalan pemantauan dan sidak pada H-7 s/d H-3 ke pasar dan pusat-pusat perbelanjaan.
- Rekomendasi
 - Rekomendasi untuk Aspek Proses penyiapan dokumen/bahan TPID Award :
 - Disusun berdasar jenis kegiatan dan kriteria untuk memudahkan saat verifikasi.
 - Melampirkan dokumen pendukung sesuai yang diminta dalam kriteria, misalnya HLM dipimpin sekda, cukup risalah rapat yang dipimpin sekda saja yang dilampirkan, yang bukan sekda tidak perlu dilampirkan, rekomendasi benar-benar dari TPID kepada kepala daerah.

- Memperhatikan kesesuaian dokumen dengan kriteria, terutama untuk TPID Kabupaten/Kota, tidak perlu melampirkan kegiatan dari provinsi dan sebaliknya.
 - Risalah rapat terdapat minimal jenis rapat, waktu, pimpinan rapat, pembahasan dan penetapan. Karena rpt terkait pengendalian inflasi/TPID seharusnya risalah rpt disusun oleh Pemda/TPID atau bersama-sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, begitu juga penetapannya meskipun penyelenggaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi akan mempersiapkan bahan dan dukungan hasil kinerja TPID Provinsi Jambi Tahun 2022 dan disampaikan pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI melalui Website : www.tpin.id, email : pokjadaerahtpip@gmail.com, dan mengirimkan hardcopy melalui POS yang disampaikan kepada Ketua Pokja Daerah TPIP.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi diminta menyampaikan bahan dan dokumen hasil kinerja TPID Kabupaten/Kota masing-masing Tahun 2021 dan disampaikan pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI melalui Website : www.tpin.id, email : pokjadaerahtpip@gmail.com, dan mengirimkan hardcopy melalui POS yang disampaikan kepada Ketua Pokja Daerah TPIP, paling lambat tanggal 18 Maret 2022.
 - Formalisasi kerjasama antar daerah perlu ditindaklanjuti dan sebagai pendorong stabilitas inflasi di daerah adalah dengan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya untuk kelancaran distribusi komoditas pangan strategis yang mempengaruhi angka inflasi antar daerah dari daerah surplus ke daerah defisit.



4) Pada tanggal 4 Agustus 2022 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada kegiatan Analisis Ekonomi Makro melaksanakan kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi Dan Ketahanan Pangan Se Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Vidcon Rumah Dinas Gubernur Jambi, dengan hasil rapat sebagai berikut :

- High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi dan Ketahanan Pangan Se Provinsi Jambi dibuka dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi (Bapak **Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.**), dengan peserta yang hadir secara virtual, antara lain :
 - Sekda Kota Jambi bersama Anggota TPID Kota Jambi.
 - Wakil Bupati Kabupaten Bungo bersama Anggota TPID Kabupaten Bungo
 - Asisten II Kabupaten Kerinci bersama Anggota TPID Kabupaten Kerinci
 - Wakil Walikota Sungai Penuh bersama Anggota TPID Kota Sungai Penuh
 - Asisten II Kabupaten Merangin bersama Anggota TPID Kabupaten Merangin
 - Pj. Bupati Tebo bersama Anggota TPID Kabupaten Tebo
 - Asisten II Kabupaten Sarolangun bersama Anggota TPID Kabupaten Sarolangun
 - Sekda Kabupaten Muaro Jambi bersama Anggota TPID Kabupaten Muaro Jambi
 - Asisten Batanghari didampingi Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Batanghari
 - Sekda Tanjung Jabung Barat bersama Anggota TPID Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Anggota TPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- POLDA Jambi (diwakilkan)
- Korem 042/GAPU Jambi (diwakilkan)
- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi (diwakilkan)
- Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi (diwakilkan)
- Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
- Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi didampingi oleh Koordinator Kebijakan Perekonomian dan Sub Koordinator Analisis ekonomi Makro
- Kepala Bulog Provinsi Jambi
- Kepala BPS Provinsi Jambi
- Kepala Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
- Pimpinan PT. Jambi Indo Guna (JII)
- Kesimpulan Rapat, sebagai berikut :
 - Masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk menjaga kesiapan bahan pangan di daerah masing-masing untuk kepentingan masyarakat.
 - Adanya koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Anatar Daerah (KAD) untuk komoditi pangan strategis yang mempengaruhi angka inflasi antar daerah dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - Diharapkan Kabupaten/Kota membuat pola panen secara bergantian (siklus tanam diatut) agar ada penyeimbangan harga.
 - Untuk Kabupaten Kerinci komoditi pangan yang kebutuhan rumah tangga agar tidak menjual ke luar Provinsi dan pendistribusian diperbanyak di dalam Provinsi.
 - Mendorong optimalisasi operasi pasar terhadap harga barang dan komoditas secara umum dalam rangka mendeteksi lonjakan harga yang terlalu tinggi.
 - TPID intensif melakukan pemantauan terhadap masalah dan hambatan yang menyebabkan inflasi dan segera mengambil langkah-langkah kebijakan bersama daerah terkait.
 - Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi.

DOKUMENTASI HIGH LEVEL MEETING (HLM) DAN RAPAT KOORDINASI PERKEMBANGAN INFLASI DAN KETAHANAN PANGAN SE PROVINSI JAMBI

Tanggal 4 Agustus 2022, bertempat di Ruang Vidcon Rumah Dinas Gubernur Jambi



5) Pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB s/d selesai, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi Dan Ketahanan Pangan Se Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Vidcon Rumah Dinas Gubernur Jambi, dengan hasil rapat sebagai berikut :

- High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi (Bapak **Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H**), dengan peserta rapat yang hadir melalui zoom meeting dan tatap muka, antara lain :

Kabupaten/Kota (melalui zoom meeting)

1. Bupati Batanghari
2. Bupati Bungo
3. Bupati Sarolangun
4. Pj. Bupati Muaro Jambi
5. Wakil Walikota Sungai Penuh
6. Sekretaris Daerah Kota Jambi
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

9. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
11. Asisten II Kabupaten Kerinci

Pemerintah Provinsi Jambi

1. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi (diwakilkan)
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi didampingi oleh Koordinator Kebijakan Perekonomian dan Sub Koordinator Analisis ekonomi Makro
7. Kepala Bulog Provinsi Jambi
8. Kepala BPS Provinsi Jambi
9. Ditreskrimsus POLDA Jambi

- Kesimpulan Rapat, sebagai berikut :

- Adanya koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Anatar Daerah (KAD) untuk komoditi pangan strategis yang mempengaruhi angka inflasi antar daerah dari daerah surplus ke daerah defisit..
- Diharapkan Kabupaten/Kota membuat system kerja panen secara bergantian (siklus tanam diatut) agar ada penyeimbangan harga.
- Untuk Kabupaten Kerinci komoditi pangan yang kebutuhan rumah tangga agar tidak menjual ke luar Provinsi dan pendistribusian diperbanyak di dalam Provinsi.
- Mendorong optimalisasi operasi pasar terhadap harga barang dan komoditas secara umum dalam rangka mendeteksi lonjakan harga yang terlalu tinggi.
- Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi.

DOKUMENTASI HIGH LEVEL MEETING (HLM) DAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI JAMBI

Pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB s/d selesai
bertempat di Ruang Vidcon Rumah Dinas Gubernur Jambi



6) Tanggal 23 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB s/d selesai, bertempat di Ruang Rapat/Vidcon Gubernur di Kantor Gubernur Jambi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI dan diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Jambi (Bapak Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.) bersama Perangkat Daerah/Instansi, antara lain :

- Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi (diwakilkan)
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (diwakilkan)
- Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi (diwakilkan)
- Kepala Bulog Provinsi Jambi
- Kepala BPS Provinsi Jambi

Dengan kesimpulan rapat, sebagai berikut :

- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Bapak Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
- Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah diikuti seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- Bapak Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, beberapa poin penting, di antaranya, kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai dampak pasca pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina. Indonesia termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi, sehingga tidak menjadi sebesar negara-negara lain. Saat ini, inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen. Lebih rendah dari inflasi banyak negara di dunia. Namun lebih tinggi dari target maksimal yang dipatok pada angka 4 persen.
- Bapak Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta untuk membentuk dan mengaktifkan satgas ketahanan pangan, memanfaatkan bantuan sosial dan belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kenaikan inflasi. Serta mendorong distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah minus dengan melakukan kerja sama antar daerah melalui skema swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Bapak Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengintruksikan beberapa hal, antara lain :
 - Mengaktifkan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk, agar melakukan pemantauan harga pangan setiap hari untuk mendapatkan informasi penyebab terjadi kenaikan harga dan laporkan setiap hari.
 - Perangkat Daerah dan Dinas Instansi terkait agar mengantisipasi faktor cuaca agar produksi antar waktu dan antar wilayah tetap terjaga.
 - Menerapkan pemberian subsidi BBM untuk angkutan pangan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).
 - Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Peningkatan Pengelolaan Pangan dan Pembangunan Pertanian, antara lain:
 - Mengoptimalkan potensi komoditas pangan
 - Mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - Memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran
 - Mempersiapkan rencana program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)
 - Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga bahan pangan di daerah, antara lain :
 - Memastikan Pembentukan Satgas Pangan di Daerah
 - Satgas Pangan agar melakukan koordinasi internal serta melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Daerah

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama terhadap kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
- Hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah :
 - Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi di daerah.
 - Melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat Gerakan menanam tanaman pangan, gerakan hemat energi dan pangan.
 - Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki surplus komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di daerah.
 - Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.
 - Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai stakeholder melalui pemanfaatan teknologi dan informasi misalnya membuat grup whatsapp untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang.
 - Mengalokasikan Dana BTT dan Dana Bansos sebagai dukungan pendistribusian atau pengangkutan kebutuhan bahan pokok.

Dokumentasi kegiatan bertempat di Ruang Rapat/Vidcon Gubernur di Kantor Gubernur Jambi :



7) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID bersama Menteri Dalam Negeri RI (Bapak Muhammad Tito Karnavian), hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, bertempat Ball Room Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Lantai II, dengan hasil rapat sebagai berikut :

- High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Jambi bersama Menteri Dalam Negeri RI dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI (Bapak Muhammad Tito Karnavian) dan Gubernur Jambi (Bapak Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H), dengan peserta rapat yang hadir melalui zoom meeting dan tatap muka, antara lain :

- **Pemerintah Provinsi Jambi**

- 1) Ketua DPRD Provinsi Jambi
- 2) KAPOLDA Jambi
- 3) Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
- 4) DANREM 042/GAPU Jambi
- 5) Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi
- 6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- 7) Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- 8) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- 9) Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi
- 10) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi
- 11) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
- 12) Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
- 13) Kepala Bulog Provinsi Jambi
- 14) Kepala BPS Provinsi Jambi

- **Kabupaten/Kota (melalui zoom meeting)**

- 1) Bupati Batanghari
- 2) Bupati Bungo
- 3) Pj. Bupati Muaro Jambi
- 4) Pj. Sarolangun
- 5) Pj. Bupati Kabupaten Tebo
- 6) Walikota Sungai Penuh
- 7) Wakil Walikota Jambi
- 8) Wakil Bupati Kabupaten Merangin
- 9) Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 10) Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 11) Wakil Bupati Kabupaten Kerinci

- Menteri Dalam Negeri (Bapak Muhammad Tito Karnavian) pada arahannya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :
 - a. Bapak Menteri Dalam Negeri RI meminta Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi terus melakukan monitoring harga komoditas setiap harinya, untuk mengetahui harga-harga mana yang naik pada komoditas bahan pokok, terutama 12 komoditas kebutuhan pokok.
 - b. Bapak Menteri Dalam Negeri RI mengarahkan Satgas Ketahanan Pangan dapat meninjau lebih dalam apakah karena ditimbun, ongkos transportasinya mahal, faktor cuaca yang buruk, atau penyebab lainnya
 - c. Meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) memulai gerakan hemat menggunakan energi karena diyakini dapat menekan laju inflasi akibat krisis global, dikarenakan banyak subsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) justru dinikmati oleh masyarakat dengan ekonomi yang tergolong mampu Sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya lemah kurang terakomodasi
 - d. Menteri Dalam Negeri memberikan masukan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi untuk melakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan, upaya yang dapat dilakukan dengan menyediakan pasokan ikan nila sebab analisa BI dan BPS, bahan pangan pemicu inflasi di Jambi antara lain bawang merah dan ikan nila, kalau untuk bawang merah secara iklim mungkin tidak cocok, yang mungkin realistis dan cepat dikerjakan, serta tingkat keberhasilan tinggi adalah dengan menyediakan pasokan ikan nila lebih baik lagi sehingga lebih stabil.
 - e. Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Cadangan Darurat untuk Pengendalian Inflasi dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

- Gubernur Jambi (Bapak Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H), pada arahannya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :
 - a. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan bahwa Provinsi Jambi kembali menggelar High Level Meeting tahun 2022 dengan tema "Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi" guna berkomitmen dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.
 - b. High Level Meeting dilaksanakan sebagai upaya untuk mereview inflasi di Provinsi Jambi dan merumuskan strategi pengendaliannya sebagai upaya menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Gubernur Jambi meminta kepada Walikota dan Bupati serta Satgas Pangan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa barang penyumbang inflasi aman dan memiliki stok. Kemudian pastikan keterjangkauan harganya. Harganya harus stabil dimasyarakat dan distribusinya juga harus dipantau. serta seluruh Satgas Pangan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi agar selalu berkoordinasi jangan lengah.
 - d. Kondisi harga komoditas unggulan di Provinsi Jambi saat ini, khususnya petani kelapa sawit belum merasakan kenaikan TBS meski keran ekspor kembali dibuka. Tren kenaikan TBS yang masih belum stabil sangat mempengaruhi perekonomian petani di Jambi yang 60 persennya merupakan petani sawit. Kekhawatirannya terkait dampak dari adanya beberapa perusahaan batu bara yang diberikan sanksi oleh Kementerian Negeri Sumber Daya Mineral (ESDM) karena angkutannya yang bermasalah, Kita khawatir bahwa akan terjadi inflasi yang tidak terkendali di Provinsi Jambi dan otomatis kalau inflasi signifikan, maka dikhawatirkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jambi.
 - e. Gubernur Jambi juga menghimbau tingkat inflasi di Provinsi Jambi dari semua Kabupaten/Kota dapat bisa dikendalikan, paling tidak harga komoditi penyumbang income perkapita keluarga Jambi yang perlu dipertahankan dan meminta kepada pihak terkait untuk selalu memonitor setiap perkembangan ekonomi dan gejolak ekonomi di Provinsi Jambi.

- Kesimpulan dan rekomendasi
 - a. Adanya koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditi pangan strategis yang mempengaruhi angka inflasi antar daerah dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - b. Diharapkan Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi terus melakukan monitoring harga komoditas setiap harinya, untuk mengetahui harga-harga mana yang naik pada komoditas bahan pokok, terutama 12 komoditas kebutuhan pokok..
 - c. Mendorong optimalisasi operasi pasar terhadap harga barang dan komoditas secara umum dalam rangka mendeteksi lonjakan harga yang terlalu tinggi.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi.
 - i. Mendorong pembentukan BUMD Pangan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam upaya intervensi komoditas penyumbang inflasi di pasar.

Dokumentasi Kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID bersama Menteri Dalam Negeri RI



8) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, hari senin, tanggal 5 September 2022, bertempat di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

- Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi (Bapak Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H), dengan peserta rapat yang hadir melalui zoom meeting dan tatap muka, antara lain :

a. Yang hadir melalui virtual/zoom meeting Ketua DPRD Provinsi Jambi (Bapak Edi Purwanto, SH.I, M.Si)

b. Forkopimda Provinsi Jambi

1. KAPOLDA Jambi
2. DANREM 042/GAPU Jambi
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi

c. Tenaga Ahli Gubernur Jambi

1. Prof. Dr. Johanes, S.E., M.S.
2. Prof. Dr. Ir. H. Zulkifli Alamsyah, M.Sc
3. Dr. M. Ridwansyah, S.E., M.Sc
4. Ir. H. Syahrasaddin, M.Si

d. Pemerintah Provinsi Jambi

1. Kepala BPKP Provinsi Jambi
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi
4. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi
5. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
6. Sekretaris Daerah Kota Jambi
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
8. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
15. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi
16. Kepala Dinas PM dan PTSP Provinsi Jambi
17. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi

18. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi
 19. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
 20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
 22. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 24. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 25. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi
 26. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 27. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
 28. Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi
 29. Kepala Perum BULOG Jambi
 30. Kepala Stasiun Meterologi Sultan Thaha Jambi
 31. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi
 32. Salas Manager PT. Pertamina Rayon II Jambi
 33. Ditreskrimsus POLDA Jambi
 34. Ketua KADIN Provinsi Jambi
 35. Direktur PT. JII
- e. Gubernur Jambi (**Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.**), **pada arahannya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :**
- Untuk menetapkan langkah-langkah teknis yang dapat di implementasikan untuk pengendalian inflasi khususnya dalam jangka pendek dan langkah awal yang akan dilakukan adalah penyusunan data base daerah produsen, kebutuhan konsumen, pola pemasaran dan lain-lain (oleh Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag) terhadap produk-produk penyumbang tingkat inflasi di Provinsi Jambi sebagai bahan kajian dalam penetapan kebijakan yang terukur.
 - Melakukan Intervensi diseluruh pasar dalam Kota Jambi dan Kabupaten Bungo lebih intensif yang dilakukan dipasar angso duo dan talang banjar di Kota Jambi serta di Pasar Bungur Kabupaten Bungo yang merupakan lokasi pencacahan pedagang oleh BPS (Kota/Kabupaten IHK).
 - Menginversi pemberian subsidi harga BBM pada nelayan dan tukang ojek
 - Pembelian Beras Lokal oleh ASN dan Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi

Vertikal/BUMN se Provinsi Jambi untuk segera di implemntasi.

- Pelaksanaan Pasar Murah di setiap Kecamatan dalam Kota Jambi dan Kabupaten Bungo berupa paket sembako (cabe merah, cabe rawit, bawang merah, beras dan minyak goreng) oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi serta Dinas Terkait Kota jambi dan Kabupaten Bungo yang waktu dan jumlah paket pelaksanaannya menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.
- Pengaktifan kembali Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang berada diseluruh Provinsi Jambi yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- Mendorong percepatan pembentukan BUMD Pangan diseluruh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
- Melalui Dinas TPHP Provinsi Jambi untuk melakukan bantuan untuk pengembangan kawasan cabe merah dan bawang merah kepada petani di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- Melakukan gerakan tanam cabe pada seluruh masyarakat dengan memberikan bantuan polybag dan bibit cabe.

f. Kesimpulan dan rekomendasi

- Penyaluran subsidi akan dilakukan melalui operasi pasar oleh Perum BULOG terhadap komoditas cabe merah, cabe rawit dan bawang merah (besarannya sedang diperhitungkan oleh Perum BULOG dan Dinas Perindag Provinsi Jambi) di Pasar Angso Duo dan Talang Banjar (Kota Jambi) serta pasar bungur (Kabupaten Bungo).
- Operasi pasar akan dilakukan selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi, serta pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Segera penerbitan SE Gubernur Jambi tentang Pembelian Beras Lokal oleh ASN dan Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal/BUMN se Provinsi Jambi untuk segera di implemntasi dan teknis pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing Pemerintah Daerah/Instansi.

Khusus untuk pembelian beras oleh ASN Provinsi Jambi akan dikerjasamakan dengan Perum BULOG Provinsi Jambi yang teknis pelaksanaannya sedang disusun bersama.

- Melakukan sosialisasi kegiatan operasi pasar oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi kepada seluruh masyarakat

melalui berbagai media khususnya media cetak dan media sosial, sehingga masyarakat mengetahui waktu dan tempat operasi serta harga komoditas yang dibawah harga pasar.

- Segera menyusun rincian data pemberian subsidi dan bantuan sosial dalam rangka pengendalian inflasi dan dampak penyesuaian harga BBM oleh Pemerintah Provinsi.

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, hari senin, tanggal 5 September 2022, bertempat di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi



- 9) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi melaksanakan rapat Koordinasi Tim Teknis Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi, yang dilaksanakan hari Sabtu, 7 September 2022 bertempat Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi
 - a. Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2022 dipimpin langsung oleh Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi (Bpk. Johansyah, S.E., M.E) didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, dengan peserta rapat terdiri dari :
 1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
 2. Dinas Perindag Provinsi Jambi.
 3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
 4. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
 5. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
 6. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.

7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
8. Dinas ESDM Provinsi Jambi
9. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi.
10. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
12. Perum BULOG Jambi.

b. Kesimpulan dan rekomendasi

- Melakukan monitoring harga komoditas setiap harinya, untuk mengetahui harga-harga mana yang naik pada komoditas bahan pokok, terutama komoditi cabe merah.
- Mendorong optimalisasi operasi pasar terhadap harga barang dan komoditas secara umum dalam rangka mendeteksi lonjakan harga yang terlalu tinggi.
- Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi.
- Mengintervensi pengalokasian anggaran BTT Kabupaten Bungo dan Kota Jambi kepada masyarakat agar tepat sasaran.
- Melaksanakan Program Pengendalian Inflasi secara kontinyu dalam jangka menengah dan panjang.
- Mengintervensi pola pelaksanaan operasi pasar di 2 (dua) pasar dalam Kota Jambi yaitu Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar serta salah satu Pasar di Kabupaten Bungo yaitu Pasar Bungur.
- Menyusun Matrik Rencana Aksi Operasi Pasar Pengendalian Inflasi Di Provinsi Jambi sekaligus membahas dan merincikan anggaran yang diperlukan dalam penganggaran untuk subsidi komoditas pangan, bantuan sosial atas dampak penyesuaian harga BBM dan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM di Provinsi Jambi sebagai pedoman pelaksana kegiatan (rincian terlampir).

Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Teknis Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2022, tanggal 7 September 2022 bertempat Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi.



Matrik Rencana Aksi Operasi Pasar Pengendalian Inflasi Di Provinsi Jambi sekaligus membahas dan merincikan anggaran yang diperlukan dalam penganggaran untuk subsidi komoditas pangan, bantuan sosial atas dampak penyesuaian harga BBM dan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM di Provinsi Jambi.

SUBSIDI KOMODITAS PANGAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI JAMBI

NO	KOMODITI	HARGA RATA-RATA BULANAN	HARGA TERENDAH	HARGA SUBSIDI	MARGIN (Harga Tertinggi - Harga Terendah)	VOLUME (KOTA JAMBI + BUNGO)	TOTAL	KET
1	CABE MERAH	87.000	57.000	60.000	30.000	4.000	120.000.000	15 Kali
							1.800.000.000	
2	CABE RAWIT	90.000	36.000	40.000	54.000	1.250	67.500.000	15 Kali
							1.012.500.000	
3	BAWANG MERAH	50.000	26.000	25.000	24.000	750	18.000.000	15 Kali
							270.000.000	
JUMLAH (Cabe Merah + Cabe Rawit + Bawang Merah)							3.082.500.000	

BANTUAN SOSIAL ATAS DAMPAK PENYESUAIAN HARGA BBM DI PROVINSI JAMBI

No	Penerima	Kebutuhan/ liter	Harga Pertalite/Solar		Margin	Jmlh hari yang disubsidi	Jmlh penerima	Total
			Sekarang	Sebelumnya				
1	Ojek	1,5	10.000	7.650	2.350	92	5.000	1.621.500.000
2	Nelayan	10	6800	5150	1.650	46	6.000	4.554.000.000
Jumlah (ojek+Nelayan)								6.175.500.000

BANTUAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU UMKM DI PROVINSI JAMBI

No	JUMLAH PENERIMA DARI DTKS	BESARAN BANTUAN	TOTAL	KET
1	282	10.000.000	2.820.000.000	Emak-emak
2	111	20.000.000	2.220.000.000	Milineal
3	148	10.000.000	1.480.000.000	Wirausaha Pemula
JLH	541		6.520.000.000	

10) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022, hari senin, tanggal 19 September 2022, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi.

- a. Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2022 dipimpin langsung oleh Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi (Bpk. Johansyah, S.E., M.E), peserta rapat terdiri dari :

Pemerintah Provinsi Jambi

1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
2. Dinas Perindag Provinsi Jambi.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi.
6. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
7. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
8. Perum BULOG Jambi.

Kabupaten Bungo dan Kota Jambi

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 2. Kepala Bappeda.
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
 4. Kepala Dinas Perindag.
 5. Kepala Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan.
 6. Kabag Perekonomian.
- b. Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, pada arahannya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :
- Rapat evaluasi pengendalian inflasi Provinsi Jambi bertujuan untuk :
 - Penganggaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi Inflasi di Provinsi Jambi
 - Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi tingginya inflasi di Provinsi Jambi
 - Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Operasi Pasar
 - Upaya penyelesaian masalah kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Operasi Pasar
 - Perlunya menentukan kebijakan dalam mengambil langkah-langkah untuk menjaga pengendalian inflasi di Provinsi Jambi
 - Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi memaparkan contoh matrik rencana aksi, rincian data pemberian subsidi dan bantuan sosial pada yang terdampak akibatnya meningkatnya inflasi kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Kota Jambi dalam rangka pengendalian inflasi dan dampak penyesuaian harga BBM oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
 - Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Pembelian Beras Lokal oleh ASN dan Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal/BUMN se Provinsi Jambi untuk segera di implementasi dan teknis pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing Pemerintah Daerah/Instansi.
- c. Kesimpulan dan rekomendasi
- Diharapkan TPID Kota Jambi dan Kabupaten Bungo terus melakukan monitoring harga komoditas setiap harinya, untuk mengetahui harga-harga mana yang naik pada komoditas bahan pokok, terutama 12 komoditas kebutuhan pokok.
 - Mendorong optimalisasi operasi pasar terhadap harga barang dan komoditas secara umum dalam rangka mendeteksi lonjakan harga yang terlalu tinggi.

- Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi.
- Mengintervensi pengalokasian anggaran BTT Kabupaten Bungo dan Kota Jambi kepada masyarakat agar tepat sasaran.
- Melaksanakan Program Pengendalian Inflasi secara kontinyu dalam jangka menengah dan panjang.

Dokumentasi Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi



11) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi, hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.

- Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi dipimpin langsung oleh Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi (Bapak. Johansyah, SE. ME) yang menyampaikan bahwa upaya sinergi antar lembaga dalam pengendalian inflasi sudah berjalan dengan baik terlihat dari posisi inflasi Kota Jambi dan Kota Bungo yang telah keluar dari 10 besar tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada posisi September 2022. Namun upaya pengendalian tetap harus ditingkatkan mengingat inflasi ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, langkah-langkah yang dilakukan sejalan dengan tema Rakor TPID saat ini, yaitu evaluasi pelaksanaan pengendalian evaluasi yang sedang berjalan dan strategi pengendalian inflasi kedepannya, dengan peserta rapat TPID Provinsi Jambi (absen rapat terlampir) dan TPI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi (hadir melalui media zoom meeting) serta PT. Binar Indhira Agni (CIPTANI).

- b. BPS Provinsi Jambi menyampaikan perkembangan inflasi Provinsi Jambi sebagai berikut :
- Inflasi mtm Provinsi Jambi 0,61% yg merupakan gabungan Kota Jambi 0,55% dan Bungo 1,10%.
 - Tren penurunan inflasi Jambi menunjukkan penurunan di Agustus 2022 dan sedikit naik di September 2022.
 - Tren selama 3 tahun terakhir untuk bulan Oktober, November dan Desember menunjukkan inflasi yang didorong hari Natal dan Tahun Baru. dari BMKG bahwa menjelang akhir tahun berpotensi hujan yang menyebabkan jalan banjir, panen tanaman pangan terganggu, sehingga tetap perlu waspada dan menjalankan upaya pengendalian inflasi gara kondisi tanaman pangan tetap terjaga. Bila tidak mengalami deflasi maka meskipun terjadi inflasi diharapkan masih terkendali.
 - Perlu tetap waspada terhadap tingkat inflasi Kabupaten Bungo karena inflasi mtm di bulan September sebesar 1,10% dan perlu dijaga hingga akhir tahun. Perlu dijaga sisi *supply* dan *demand* penyangga Kabupaten Bungo, antara lain Kabupaten Sarolangun, Bangko, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- c. Bulog Provinsi Jambi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bulog berupaya melakukan operasi pasar untuk beras medium dan premium setiap hari di seluruh Kota/Kab di Prov Jambi.
 - Stok beras untuk kebutuhan di Provinsi Jambi saat ini dalam kapasitas cukup memadai.
 - Bulog sangat mengapresiasi Gerakan Pembelian Beras Lokal/ Bulog Jambi sesuai instruksi Gubernur Jambi, sehingga akan mengurangi permintaan beras di pasar sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi.
- d. Bank Indonesia menyampaikan sebagai berikut:
- Seluruh negara di dunia sedang mengalami krisis biaya hidup karena kenaikan biaya energi dan pangan.
 - IMF memproyeksikan bahwa inflasi dunia akan lebih tinggi dari proyeksi April 2022 sehingga masalah inflasi adalah masalah internasional.
 - Realisasi inflasi akhir tahun 2022 diproyeksikan akan berada diatas target inflasi Provinsi Jambi yang ditetapkan.
 - Selain beras, minyak goreng, cabai merah, perlu juga perhatian terhadap kenaikan harga telur ayam.
- e. Ciptani menyampaikan sebagai berikut :
- Ciptani adalah aplikasi berbasis Web yang memuat informasi petani, luas, waktu panen, dan pedagang. Melalui website ini pihak/dinas terkait memperoleh manfaat informasi jumlah produksi, luas, masa semai, dan masa panen. Bagi petani, aplikasi ini sebagai media pemasaran sehingga harga pertanian lebih tinggi dan konsumen memperoleh produk pertanian dengan harga lebih murah karena mata rantai tengkulak banyak yang dipangkas.
 - Ciptani saat ini sudah MOU dengan DKP dan Dinas Pertanian Provinsi Jambi.

- Keterbatasan Ciptani adalah petani mitra masih sedikit dan keterbatasan modal sehingga membutuhkan kerjasama dari dinas terkait.
 - f. Bapak Dede Martino menyampaikan sebagai berikut :
 - Dede Martino adalah pencipta mesin sanggai yang dapat melakukan pengawetan cabai dan sayuran.
 - Dede Martino memiliki rencana ekspor cabai dan sayuran kering ke Abu Dhabi.
 - Inovasi Dede Martino menjadi alternatif ketika harga cabai turun dan meningkatkan nilai manfaat cabai.
 - g. Seluruh Kota/Kabupaten melaporkan mengenai kondisi inflasi masing masing dan upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan.
 - I. Kesimpulan dan rekomendasi
 - Memperkuat koordinasi TPID melalui Rapat Koordinasi secara berkala.
 - Secara umum beras menunjukkan kenaikan harga dan salah satu upaya yang telah dilakukan adalah Gerakan Pembelian Beras Lokal oleh ASN Se-Provinsi Jambi. Asisten juga mengharapkan Gerakan tersebut diikuti oleh industri jasa keuangan, baik melalui BMPD maupun FKIJK Provinsi Jambi.
- 12) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Akhir Tahun TPID Provinsi Jambi Tahun 2022, tanggal 6 Desember 2022, bertempat di Hotel Semagi Muara Bungo.
- a. Kegiatan HLM Akhir Tahun TPID Provinsi Jambi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi (Bapak Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I) yang didampingi oleh Wakil Bupati Bungo, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati Sarolangun, dan Wakil Bupati Batanghari, dengan peserta yang hadir sebagai berikut :
 - Pemerintah Provinsi Jambi
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi
 - BAPPEDA Provinsi Jambi
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Jambi
 - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi
 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
 - Dinas Kominfo Provinsi Jambi
 - Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 - Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
 - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
 - OJK Provinsi Jambi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
 - Kantor Wilayah Perum BULOG Provinsi Jambi
 - BMPD Provinsi Jambi
 - Forum CSR
 - FKIIJK Provinsi Jambi
 - Forum BUMN
 - Direktur PT. JII Provinsi Jambi
 - Forkopimda Kabupaten Bungo
 - Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jambi
- b. Arahan Wakil Gubernur Jambi (Bapak Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I), sebagai berikut :
- Memperhatikan kondisi global akhir-akhir ini, adanya krisis pangan dan energi, dan setiap negara berusaha menyediakan pangan untuk negerinya. Krisis pangan dan energi tersebut berpengaruh ke seluruh dunia, khususnya bagi negara-negara pengimpor komoditas dimaksud. Efek lanjutan yang akan terjadi ialah kecenderungan peningkatan harga (peningkatan inflasi) komoditas, khususnya komoditas pangan masyarakat.
 - Pengendalian inflasi sangat penting, karena inflasi yang tidak terkendali akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Maka dari itu, upaya sinergis semua *stakeholder* (pemangku kepentingan), termasuk sinergisitas yang kuat Pemerintah Provinsi Jambi/Kabupaten/Kota dengan stakeholder harus terus kita bangun, yang tentunya sangat bermanfaat dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.
 - Sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri RI pada rapat rutin pengendalian inflasi bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia yang dilakukan setiap hari senin, ada 6 (enam) langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam pengendalian inflasi yaitu: 1.Melaksanakan operasi pasar murah, 2.Sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, 3.Kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, 4.Gerakan menanam, 5.Merealisasikan BTT, dan 6.Dukungan Transportasi dari APBD, dengan Langkah-langkah tersebut seluruhnya telah kita laksanakan seperti :
 - Operasi Pasar dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditi penyumbang inflasi dan sekaligus Pencanaan Operasi Pasar Secara Rutin hingga Desember.
 - Memberikan subsidi untuk pengendalian harga komoditas penyumbang inflasi, yaitu: *Subsidi langsung kepada distributor, Subsidi langsung pada pengecer (penjual langsung dipasar), dan Bantuan ongkos angkut pada distributor*

- Melakukan Gerakan Bersama Pembelian Beras Lokal/BULOG oleh ASN Se Provinsi Jambi, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Forum BUMN, Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Jambi
- Memberi subsidi harga BBM kepada nelayan dan tukang ojek (sudah diberikan kepada 6.000 orang nelayan dengan besaran per orang Rp.759.000 untuk 3 bulan (Rp.253.000,- per bulan).
- Memberikan bantuan bibit cabai merah dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi kepada TNI/MAKOREM GAPU/042 untuk budidaya pada lahan-lahan produktif, bantuan bibit cabai merah kepada Pondok Pesantren, bantuan alsintan dan saprodi kepada SMKPP Negeri Jambi.
- Pencanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

c. Penyampaian Narasumber

- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi (Bapak Dwiky Satria Putranto), menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - Kondisi perekonomian masih belum baik/normal Bank Indonesia hadir memiliki tujuan tunggal mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang di dukung oleh 3 (tiga) bidang tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.
 - Di tengah dinamika perekonomian internal dan eksternal Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tetap terjaga dan tercatat tetap tumbuh meskipun terdeselerasi diangka 5,20% (yoy), berada di peringkat 3 di Regional Sumatera. Hal ini didukung terakselerasinya kinerja dua LU Utama, yaitu LU Pertanian, dan LU Pertambangan, dan LU Perdagangan yang masih mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan III 2022.
 - Operasi pasar oleh Bulog dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi terus berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. Hingga November 2022, tercatat telah diselenggarakan 10 High Level Meeting, 37 Rapat Koordinasi, 33 Sidak Pasar dan 184 kegiatan pasar murah tambahan.
 - Outlook perekonomian global dan nasional bahwa Inflasi diperkirakan di atas rentang sasaran inflasi tahun 2022 dan berisiko di atas rentang sasaran 2023, imbas dari second round impact penyesuaian harga BBM yang akan menyebabkan :

- ✓ Panganan Bergejolak (Gangguan cuaca la nina, kesenjangan pasokan antarwaktu dan antar daerah, kenaikan harga komoditas globabl, kenaikan permintaan hotel, restoran dan catering).
- ✓ Harga diatur pemerintah (Harga energi meningkat, mobilitas meningkat, Fuel Surcharge angkutan udara).
- ✓ Ekspektasi inflasi meningkat, permintaan meningkat gradual, resiko nilai tukar, dampak lanjutan kenaikan VF dan AP.

Outlook perokonomian Provinsi Jambi, Perkembangan inflasi Provinsi Jambi dalam peringkat nasional Kota Jambi Peringkat 40 sedangkan Kabupaten Bungo Peringkat 53.

Kondisi terkini komoditas penyumbang inflasi tertinggi, Hingga minggu pertama Desember 2022, beberapa komoditas mulai menunjukkan penurunan stok antara lain Beras, Cabai Rawit, Bawang Putih, dan Minyak Goreng. Sehingga perlu diwaspadai kecukupan stok beberapa komoditas dimaksud, terutama komoditas Beras dan aneka cabai seiring berakhirnya masa panen raya dan masuknya musim hujan yang dapat mengganggu ketersediaan pasokan.

Upaya pengendalian inflasi

- Melakukan kegiatan sidak harga pangan strategis.
- Kegiatan pasar murah melalui toko tani.

- Kantor BPS Provinsi Jambi (Budi Hartono, SST, M. Si), menyampaikan paparan sebagai berikut :

- Awal bulan merilis perkembangan harga konsumen Provinsi Jambi, Kota Jambi pada bulan November Tahun 2022 dilihat dari bulan ke bulan inflasi 0,55 persen menyebabkan inflasi 5,56 menjadi 6,07 persen. Sedangkan Kabupaten Bungo perkembangan harga konsumen pada bulan November 2022 dilihat dari bulan ke bulan inflasi 5,32 % menyebabkan inflasi 5,79 %. Karena itu Perlu diketahui bahwa penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau 2022.
- Atas kerja keras Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh instansi/Stakeholder terkait telah bekerja keras dalam pengendalian inflasi yang akhirnya pada bulan November 2022 menempati posisi yang cukup aman keluar dari zona 10 besar dan Kota IHK dengan tingkat inflasi *Year on Year* Teringgi secara Nasional, Kota Jambi posisi 34 dan Kabupaten bungo posis 40.
- Penyumbang inflasi tiap tahun adalah komoditas makanan, tahu tempe mulai naik dan menyumbangkan angka inflasi karena stok kedelai mulai menipis.

- Kepala BPKPD Provinsi Jambi (Bapak Agus Pirngadi), menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/4825/SJ TGL 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, menghimbau seluruh Kepala Daerah sebagai Berikut :
 - ✓ Diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah :
 - ✓ Menjaga keterjangkauan harga /daya beli masyarakat
 - ✓ Kelancaran distribusi dan transportasi
 - ✓ Kesetabilan harga pangan
 - ✓ Ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah
 - ✓ Memberikan bantuan sosial masyarakat rentan inflasi
 - Untuk anggaran pengendalian inflasi yang belum tersedia dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT :
 - ✓ Pergeseran anggaran kepada perangkat daerah teknis (Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda Perubahan APBD)
 - ✓ Pergeseran Anggaran kepada Perangkat Daerah Teknis (Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dituangkan Dalam LRA Bagi Pemerintah yang tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan APBD)
 - ✓ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, DTU 2% Belanja Wajib untuk Perlindungan Sosial, dapat digunakan untuk Bansos (ojek,umkm dan nelayan), Penciptaan lapangan kerja, Subsidi sektor transportasi angkutan umum
- Kesimpulan dan rekomendasi
 - Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk melakukan pementauan terhadap perkembangan harga pada komoditi pangan dalam pengendalian inflasi di daerah.
 - Menjaga Permintaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan upaya penyediaan pasokan kebutuhan dan menjaga stabilitas harga di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk melakukan sidak pasar dalam menjaga kenaikan harga menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2023.

- Pemerintah Daerah agar dapat melakukan Koordinasi dengan daerah penghasil dan melaksanakan kerjasama antar daerah untuk perencanaan pasokan komoditi yang diperlukan.
- Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota segera merealisasikan Anggaran BTT untuk Pengendalian Inflasi, baik dalam bentuk subsidi produk atau bantuan social pada masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten/Kota dapat segera merealisasikan bantuan transportasi dari APBD akibat terdampak pada kenaikan harga BBM, guna meningkatkan daya beli masyarakat
- Mendorong gerakan menanam komoditas pangan kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Khusus untuk Kota Jambi dan Kabupaten Bungo mengupayakan pengendalian inflasi agar agar tetap terjaga dan terkendali.
- Pengendalian Inflasi diharapkan dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi bukan hanya di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo sebagai lokasi perhitungan IHK, secara kontinyu dan konsisten khususnya menghadapi hari-hari besar Keagamaan dan segera melaporkan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi bila memerlukan dukungan kegiatan.

Dokumentasi High Level Meeting (Hlm) Akhir Tahun TPID Provinsi Jambi Tahun 2022 Bertempat di Hotel Semagi Bungo, Kabupaten Bungo, tanggal 6 Desember 2022



- h. Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2022, yaitu :
- 1) Secara umum, kondisi lebih membaik dari bulan sebelumnya, dan kinerja TPID telah memberikan dampak terhadap upaya strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Komunikasi Efektif);
 - 2) Bantuan bibit cabai merah dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi kepada TNI/MAKOREM GAPU/042 untuk budidaya pada lahan-lahan produktif, bantuan bibit cabai merah kepada Pondok Pesantren, bantuan alsintan dan saprodi kepada SMKPP Negeri Jambi, dan penyerahan subsidi ongkos angkut dan optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis kepada TPID Provinsi Jambi;
 - 3) Operasi Pasar dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditi penyumbang inflasi dan sekaligus PENCANANGAN OPERASI PASAR Secara Rutin hingga Desember;
 - 4) Melakukan subsidi untuk pengendalian harga komoditas penyumbang inflasi, yaitu:
 - Subsidi langsung pada distributor
 - Subsidi langsung pada pengecer (penjual langsung dipasar)
 - Bantuan ongkos angkut pada distributor
 - Subsidi langsung pada Perum BULOG Jambi untuk pelaksanaan Operasi Pasar
 - 5) Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan;
 - 6) Melakukan Gerakan Bersama Pembelian Beras Lokal/BULOG oleh ASN Se-Provinsi Jambi, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Forum BUMN, Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Jambi;
 - 7) Memberi subsidi harga BBM pada nelayan dan tukang ojek (Sudah dilakukan penyaluran bantuan BBM bagi nelayan sebanyak 6.000 orang dengan besaran perorang Rp. 759.000,- dengan rincian pemberian Rp. 253.000,- perbulan).
 - 8) Rencana tindak lanjut jangka menengah / jangka panjang
 - 1) Gerakan tanam cabai rawit 1 Juta batang di Kabupaten Bungo
 - 2) Gerakan payo menanam cabe 13 Ha di Kota Jambi.
 - 3) Pemberian 30.000 batang bibit cabai kepada KPM dan PKH di Kota Jambi.
 - 4) Pemberian 20.000 bibit bawang merah kepada KPM dan PKH di Kota Jambi.
 - 5) Pemberian pupuk dan bibit cabai dan plastik mulsa kepada petani cabai di Kabupaten Bungo.
 - 6) Kantor Perwakilan BI Prov Jambi melakukan Pemberian pendampingan dan saprodi ke Gapoktan cabai merah (Muaro Jambi), ikan nila (Kab. Bungo) , padi (Kab Tanjabtim), Ayam Ras (Muaro Jambi), Sapi (Kab Bungo).

- 7) Edukasi konsumsi cabai olahan diseluruh Kab/Kota se-Provinsi Jambi.
 - 8) Pembelian beras lokal/Bulog oleh: ASN Pempro/Kab/Kota; BMPD; FKIIJK; Forum BUMN; Forum CSR; TNI/POLRI/Kejaksaan.
 - 9) Hilirisasi minyak goreng dan beras (KADIN, Forum CSR, FKIIJK, BMPD, BUMN, PTPN VI, Angkasapura dan Insatansi terkait).
 - 10) Program Makmur Agrosolus Pupuk Indonesia untuk pertanian (OJK, Pemprov/Pemkab/Kot, PUSRI).
 - 11) Pelaksanaan Pasar Murah di setiap Kecamatan dalam Kota Jambi dan Kabupaten Bungo berupa paket sembako oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi serta Dinas Terkait Kota jambi dan Kabupaten Bungo yang waktu dan jumlah paket pelaksanaannya menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.
 - 12) Pengaktifan kembali Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang berada diseluruh Provinsi Jambi yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
 - 13) Mendorong percepatan pembentukan BUMD Pangan diseluruh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
 - 14) Melalui Dinas TPHP Provinsi Jambi untuk melakukan bantuan untuk pengembangan kawasan cabe merah dan bawang merah kepada petani di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
 - 15) Melakukan gerakan tanam cabe pada seluruh masyarakat dengan memberikan bantuan polybag dan bibit cabe.
- i. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dalam proses kejasama dengan **PT. CIPTANI** ingin membentuk digitalisasi pada sektor pertanian melalui aplikasi berbasis Web yang menyediakan informasi guna membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan, dengan uraian sebagai berikut :
- 1) Ciptani menawarkan penyediaan informasi sebagai berikut :
 - Jumlah petani ;
 - Produk yang ditanam;
 - Luas tanam;
 - Waktu tanam;
 - Perkiraan panen;
 - Distribusi hasil panen; dan
 - Media komunikasi petani dan dinas terkait.
 - 2) Keuntungan aplikasi Ciptani.id, sebagai berikut :
 - Petani menanam berdasarkan data, sehingga penyerapan hasil panen dapat diserap secara maksimal;
 - Petani memperoleh harga produk yang baik karena rantai persediaan yang pendek (memutus rantai tengkulak). Demikian juga halnya konsumen memperoleh harga produk pertanian lebih terjangkau;
 - Petani langsung terhubung dengan Dinas terkait memudahkan dalam slusi pertanian;

- Dinas terkait memperoleh data mengenai produksi dan distribusi pangan sehingga dapat memetakan hasil pertanian sehingga memudahkan dalam pengendalian inflasi dan keputusan.
- j. Pada tanggal 23 September 2022, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi, bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi, dengan uraian sebagai berikut :
- 1) GNPIP bertujuan untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan, sehingga dapat mendukung daya beli dan mempercepat pemulihan ekonomi.
 - 2) Dilaksanakan juga Penandatanganan Pernyataan Komitmen Mendukung GNPIP antara Gubernur Jambi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi.



- k. Upaya yang telah dilakukan TPID Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi, yaitu :

1) Subsidi Komoditas Pangan

- Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan intervensi komoditi cabai merah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 8 ton.
- Melalui giat 1 kali operasi pasar untuk cabai merah, dan sudah menunjukkan stabilnya harga cabai sampai saat ini.



2) Launching Gerakan Pembelian Beras Lokal Asn Se-Provinsi Jambi

- Telah dilakukan Launching Gerakan Pembelian Beras Lokal ASN pada tanggal 5 Oktober 2022.
- Pembelian Beras Lokal wajib oleh ASN Se-Provinsi Jambi dengan kriteria :
 - 1) Gubernur Jambi minimal 35 kg
 - 2) Wakil Gubernur minimal 30 kg
 - 3) Eselon 1 minimal 25 kg
 - 4) Eselon 2 minimal 20 kg
 - 5) Eselon 3 minimal 15 kg
 - 6) Eselon 4 minimal 10 kg
 - 7) Staf (non eselon) minimal 5 kg.
- Gerakan Pembelian Beras Lokal oleh ASN telah direplikasi di Kota/Kabupaten se-Provinsi Jambi.
- Mendorong ASN/Pegawai Dilingkup Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Instansi Vertikal/BUMN untuk membeli beras langsung hasil produksi petani lokal yang ada di daerah masing-masing.

3) Pembelian beras lokal/Bulog oleh Pegawai Lingkup Unit Kerja Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (Pada tanggal 23 Oktober 2022 telah dilaksanakan Pembelian Beras Lokal/ Bulog oleh Pegawai Lingkup Unit Kerja FKIJK dan BMPD bertempat di Bank Jambi, kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jambi)



4) Bantuan Sosial Atas Dampak Penyesuaian Harga BBM di Provinsi Jambi

- Sudah dilakukan penyaluran bantuan sosial untuk subsidi bbm kepada 6.000 nelayan pada tanggal 6 November 2022, total bantuan sebesar Rp.759.000.- selama 3 bulan, dengan rincian Rp.253.000,-perbulan.
- Bantuan subsidi BBM kepada 5.000 ojek.

No	Penerima	Kebutuhan/ Liter	Harga Pertalite/Solar		Margin	Jumlah Hari Yang Disubsidi	Jumlah Penerima	Total
			Sekarang	Sebelumnya				
1	Ojek	1,5	10.000	7.650	2.350	92	5.000	1.621.500.000
2	Nelayan	10	6.800	5.150	1.650	46	6.000	4.554.000.000
Jumlah (Ojek + Nelayan)								6.175.500.000

Dalam penanganan pengendalian Inflasi Biro Perekonomian mendapat Apresiasi Stakeholders dari Mitra Strategis Terkolaboratif dalam Mendukung Pemulihan/Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jambi Tahun 2022 dari Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2022 di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2022.



2. Kegiatan Analisis Ekonomi Mikro

- a. Biro Perekonomian melalui kegiatan Analisis Ekonomi Mikro telah berpartisipasi pada kegiatan GERNAS BBI Provinsi Jambi selama bulan Januari sampai dengan Maret 2022, pada tanggal 11 April 2022 mengadakan Rakor Penutupan (Harvesting) GERNAS BBI Provinsi Jambi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dengan dihadiri kepala perangkat Daerah/Instransi terkait di Provinsi Jambi.



Rakor Penutupan (Harvesting) GERNAS BBI Provinsi Jambi
di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

- b. Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi
- 1) Tugas TPAKD Provinsi Jambi :
 - mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
 - merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
 - mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
 - memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah.
 - mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah.
 - melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
 - melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait mengenai program akses keuangan di daerah.
 - melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah minimal 4 (empat) kali setahun.
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur Jambi.

- dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rakorda TPAKD 5 September 2022
di Ball Room Gedung Mahligai 9 Jambi

3. Kegiatan SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Sehubungan dengan sangat pentingnya Sektor Pertanian dalam pembangunan di Provinsi Jambi, dan kontribusi sektor ini harus terus kita tingkatkan secara bersama-sama, baik dengan meningkatkan kualitas produk-produk pertanian Provinsi Jambi terutama komoditas unggulan, meningkatkan produktivitas (intensifikasi), maupun dengan upaya ekstensifikasi melalui perluasan lahan tanam serta menanam komoditas baru. Satu hal yang sangat penting adalah hilirisasi komoditas unggulan, untuk menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian Provinsi Jambi. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,17%. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I -2022 terhadap triwulan I -2021 tumbuh 4,64%. Pada masa Pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Jambi membawa dampak sosial-ekonomi yang besar di luar sektor kesehatan, dampaknya multisektoral. Berdasarkan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19, diperlukan strategi dalam rangka pemulihan kondisi pasca Pandemi Covid-19. Biro Perekonomian khususnya Kegiatan SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan melakukan FGD dengan tema “Menyongsong Kebangkitan Ekonomi Jambi Pasca Pandemi Covid - 19 Melalui Percepatan Hilirisasi Produk - Produk Pertanian” agar memperoleh informasi detail tentang upaya Pemulihan Ekonomi Jambi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Hilirisasi Produk-Produk Pertanian, dengan memperkuat

hilirisasi produk pertanian sehingga ekspor Provinsi Jambi kedepannya bukan lagi komoditas bahan mentah.



Focus Group Discussion (FGD) 25 Agustus 2022
Menyongsong Kebangkitan Ekonomia Jambi Pasca Pandemi Covid - 19
Melalui Percepatan Hilirasi Produk - Produk Pertanian

4. Kegiatan SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Pada hari selasa tanggal 6 September 2022 Biro Perekonomian pada Kegiatan SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup melaksanakan FGD bertempat di Hotel Ceria Jambi, menurut UU no 03 tahun 2020 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paasca tambang. Wilayah pertambangan (memperhatikan aspek lingkungan, fisika,kimia, social/ekonomi masyarakat sekitar area pertambangan) kaidah pertambangan yang baik: Perizinan, Teknik Pertambangan, Surve Pendahuluan , Ekplorasi,Studi kelayakan, Kontruksi,

Operasi Produksi, Pengelolaan/ Pengangkutan dan Penjualan dan Perlindungan lingkungan pertambangan.



5. Kegiatan SDA Energi dan Air

LPG

Biro Perekonomian khususnya Kegiatan SDA Energi dan Air telah melakukan rapat pengawasan evaluasi pendistribusian LPG subsidi tabung 3kg dan penetapan harga tertinggi (HET) subsidi tabung 3kg 28 Maret 2022 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dihadiri oleh OPD teknis terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi. Rapat koordinasi ini menyepakati hal hal sebagai berikut :

1. Kabupaten /Kota dapat menyampaikan usulan Harga Eceran Tertinggi (HET) tahun 2022 kepada Gubernur Jambi, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/ Kota masing- masing;
2. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Migas terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan harga eceran tertinggi di tingkat kecamatan.



6. Kegiatan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

Sehubungan dengan adanya aplikasi E-BUMD yang bertujuan memperoleh informasi dan data yang cepat, akurat dan actual tentang laporan keuangan E-BUMD yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota sebagai pemilik modal untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan BUMD, memastikan keuangan investasi, serta mengevaluasi hasil realisasi terhadap pencapaian target, maka Biro Perekonomian khususnya Kegiatan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha melakukan FGD tentang Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Perancangan Aplikasi Pelaporan Keuangan BUMD secara Online (E-BUMD) se Provinsi Jambi di Hotel Shang Ratu.



7. Kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitase

Tarif Atas dan Tarif Bawah Air Minum di Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dimana tugas dan fungsi pembinaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi berada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi maka telah disusun Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Tarif Atas dan Tarif Bawah Air Minum di Provinsi Jambi.

Pokja Penetapan Tarif Atas dan Tarif Bawah Air Minum Perlu menyusun Rencana Aksi agar dalam menetapkan tarif tidak memberatkan dan menimbulkan gejolak di masyarakat maka perlu untuk menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan terlebih dahulu sebelum diterbitkan nya Surat Keputusan Gubernur tentang Tarif Atas dan Tarif Bawah Air Minum.

Berdasarkan Rapat yang diadakan di Hotel Aston Jambi pada Kamis, 30 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Beberapa Kabupaten/Kota masih menerapkan tarif di bawah tarif dasar. Dikarenakan respon dari masyarakat terhadap tarif dasar yang menganggap bahwa tarif dasar terlalu tinggi.
2. Dari total 10 PDAM dari masing-masing kabupaten, ada 1 PDAM di salah satu Kabupaten yang tidak sehat yaitu PDAM Tirta Pangabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dilihat dari tingkat kesehatan pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada tahun 2019 tingkat kesehatan PDAM di angka 1,86 yang artinya tidak sehat/sakit, pada tahun 2020 tingkat kesehatan PDAM di angka 2,24 yang artinya kurang sehat, pada tahun 2021 tingkat kesehatan PDAM di angka 2,09 yang artinya tidak sehat/sakit.
3. Tingkat kinerja PDAM yang menempati posisi terakhir adalah PDAM Tirta Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2021 dengan angka 41,8 yang artinya kurang baik. Namun pada tahun 2019 dan 2020 PDAM Tirta Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi tingkat kinerjanya yaitu 50,07 dan 50,37 yang artinya cukup. Di lihat dari kinerja selama 3 tahun terakhir, PDAM Tirta Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan kinerja pada tahun 2021.
4. Penetapan tarif Air Minum untuk tahun 2023 sebagai berikut.

**BESARAN TARIF BATAS BAWAH DAN TARIF BATAS ATAS AIR MINUM KABUPATEN /KOTA
SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF BATAS ATAS	TARIF BATAS BAWAH
1	KABUPATEN KERINCI	Rp.10.596/ m ³	Rp.4.180/m ³
2	KABUPATEN MERANGIN	Rp.10.253,48/ m ³	Rp.6.343,06/ m ³
3	KABUPATEN BUNGO	Rp.10.596/ m ³	Rp.3.968/ m ³
4	KABUPATEN TEBO	Rp.10.523,48/ m ³	Rp.5.026/ m ³
5	KABUPATEN SAROLANGUN	Rp.10.886/ m ³	Rp.6.977/ m ³
6	KABUPATEN BATANGHARI	Rp.10.523,48/ m ³	Rp.5.848,85/ m ³
7	KABUPATEN MUARO JAMBI	RP.10.996,96/ m ³	Rp.8.718,16/ m ³
8	KABUPATEN TANJAB BARAT	Rp.10.523,48/ m ³	Rp.9.005,52/ m ³
9	KOTA SUNGAI PENUH	Rp.10.596,14/ m ³	Rp.4.859,16/ m ³
10	KOTA JAMBI	Rp.10.590/ m ³	Rp.4.400/ m ³



Berdasarkan Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada Kamis, 15 September 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Penambahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Surat Keputusan Gubernur.
2. Mengkoordinasikan kembali terkait anggota Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
3. Penambahan anggota Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
4. Penetapan tugas pokok dan fungsi tiap anggota kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Sebagai berikut :

Pokja AMPL secara umum bertugas:

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pemilihan kabupaten / kota peserta program PPSP atau program pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan sejenisnya.
- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk diantaranya memfasilitasi pelaksanaan Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dalam penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) air minum, Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Air Limbah, Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) persampahan, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM),
- c. Memberikan input strategis pada pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait dalam proses investasi dan implementasi program air minum dan penyehatan lingkungan.
- d. Melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi air minum dan penyehatan lingkungan di tingkat Provinsi.

Ketua Pokja AMPL Bertugas:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran dan pengendalian pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja AMPL provinsi.
- b. Mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pokja AMPL.
- c. Memberikan arahan kebijakan Program PPSP kepada setiap anggota Pokja AMPL agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal
- d. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja AMPL provinsi
- e. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan Program PPSP yang ditugaskan oleh Gubernur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur
- f. Memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pokja AMPL sebagaimana tugas Pokja AMPL.
- g. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja AMPL.

Sekretaris Pokja AMPL bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan Pokja AMPL Provinsi.
- b. Memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang Pokja AMPL Provinsi
- c. Menyiapkan bahan masukan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja AMPL dan kelembagaan pengelola sanitasi di provinsi dan dalam kerangka fasilitasi ke kabupaten/kota.
- d. Menyiapkan laporan Program PPSP berdasarkan laporan yang dihimpun dari setiap bidang Pokja AMPL Provinsi.
- e. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPSP oleh Pokja AMPL Provinsi ke kabupaten/ kota dan konsultasi ke Pusat serta melakukan update NAWASIS secara reguler.
- f. Fasilitasi penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi dan mengelola database Roadmap Sanitasi Provinsi.
- g. Fasilitasi tim Pokja AMPL guna menghadiri pertemuan tahunan kabupaten/kota peserta PPSP dan agenda supervisi penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyusunan/pemutakhiran SSK atau lokakarya SSK dan implementasi SSK.
- h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja dan Ketua Harian Pokja AMPL Provinsi.
- i. Membantu tugas Ketua Pokja AMPL.

Tim Pelaksana Pokja AMPL bertugas sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) serta updating NAWASIS.
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan PPSP jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
 - c. Melakukan supervisi agar perumusan kebijakan penyusunan dan/atau pemutakhiran SSK sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
 - d. Memverifikasi dan mensinkronisasikan usulan program dan kegiatan prioritas sanitasi dalam SSK yang akan diajukan dalam lokakarya SSK.
 - e. Mengkoordinasikan lokakarya SSK di provinsi serta mensinkronisasikan rencana program dan kegiatan prioritas sanitasi yang diusulkan kabupaten/kota berdasarkan sumber pendanaan APBN dan APBD provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang sah, semenjak pelaksanaan MUSRENBANG.
 - f. Menyiapkan input untuk Pokja AMPL dalam memberikan saran dan masukan kepada PD terkait dalam rangka persiapan percepatan pemenuhan layanan sanitasi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi baik mencakup

pelaksanaan kegiatan sosialisasi maupun implementasi pembangunan sanitasi.

- g. Menyiapkan input untuk Pokja AMPL dalam memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan percepatan pemenuhan layanan sanitasi oleh PD provinsi, kabupaten/kota, maupun kementerian/lembaga terkait.
 - h. Menyiapkan input untuk Pokja AMPL dalam rangka melakukan tindakantindakan korektif yang perlu diambil oleh PD provinsi, kabupaten/kota, maupun kementerian/lembaga terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik.
 - i. Menyiapkan input untuk Pokja AMPL dalam penyiapan implementasi pembangunan sanitasi.
 - j. Menyiapkan input laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL.
 - k. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja.
 - l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja.
 - m. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja.
 - n. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang pokja.
 - o. Memastikan optimalisasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kerja bidang pokja.
 - p. Menghimpun laporan kerja bidang secara berkala.
2. Bidang Kelembagaan dan Pendanaan
- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk mendukung pendanaan Program PPSP provinsi dan fasilitasi kabupaten/kota.
 - b. Mengkoordinasikan rencana pendanaan program dan kegiatan PPSP provinsi, kabupaten/kota dan pusat yang akan didanai melalui APBN dan APBD provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang sah dalam lokakarya SSK.
 - c. Mengawal pendanaan APBD provinsi terkait sarana dan prasarana sanitasi regional teralokasi, baik untuk investasi baru maupun operasional dan pemeliharaan ke dalam RKA-PD provinsi.
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dan penyiapan laporan alih pengelolaan sarana dan prasarana/aset sanitasi provinsi serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan alih pengelolaan sarana dan prasarana/aset sanitasi kabupaten/kota.
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan penyusunan rencana pendanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset Program PPSP provinsi dan fasilitasi kabupaten/kota.

- f. Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan rencana pendanaan provinsi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kabupaten/kota.
- g. Mendukung kelancaran penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan PPSP.
- h. Mengkoordinasikan rencana pendanaan bagi implementasi, semenjak pelaksanaan Musrenbang.
- i. Menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pendanaan kepada Ketua Pokja AMPL atau pokja lainnya yang membidangi sanitasi provinsi.
- j. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL Provinsi.
- k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja.
- l. Melakukan penguatan kelembagaan pokja kabupaten/ kota dalam pelaksanaan program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan sejenisnya.
- m. Memfasilitasi penyiapan dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di provinsi dan kabupaten/kota.
- n. Mengevaluasi penguatan kelembagaan dan pendanaan pokja Air Minum dan penyehatan lingkungan daerah kabupaten/kota.
- o. Memberikan masukan strategis bagi upaya pengembangan pengelola layanan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- p. Memastikan kebutuhan, optimalisasi, dan mobilisasi dukungan sumber daya pendanaan baik yang bersumber dari provinsi maupun dari luar yang sah untuk digunakan dalam pencapaian program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan sejenisnya di tingkat provinsi.
- q. Membuat laporan kerja bidang secara berkala

3. Bidang Teknis

- a. Membantu penyusunan aspek teknis Roadmap Sanitasi Provinsi untuk optimalisasi pengelolaan percepatan dan keberlanjutan layanan sanitasi provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Memberikan pertimbangan teknis dalam perencanaan Program PPSP di provinsi.
- c. Menyiapkan input bahan pelatihan untuk penyusunan SSK dan pelatihan untuk percepatan implementasi SSK serta pelatihan layanan sanitasi berkelanjutan.
- d. Menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja AMPL Provinsi.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kabupaten/kota.

- f. Menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang teknis kepada Ketua Pokja AMPL.
 - g. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL Provinsi.
 - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja AMPL Provinsi.
 - i. Mengkoordinasikan dan memberikan advis aspek teknis dalam penyusunan dokumen pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di kabupaten/kota antara lain Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dalam penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) air minum, Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Air Limbah, Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) persampahan, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).
 - j. Memberikan bantuan fasilitasi dan input strategis dalam mendukung pengerjaan dan penyusunan dokumen pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di provinsi atau kabupaten/kota.
 - k. Menjaga kualitas substansi dan aspek teknis dalam pengelolaan program pembangunan penyehatan lingkungan dan air minum dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi di kabupaten/kota peserta program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan sejenisnya.
 - l. Fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota.
 - m. Fasilitasi kerjasama pengelolaan Persampahan Regional Kabupaten/Kota
 - n. Fasilitasi kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota.
 - o. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.
4. Bidang Penyehatan Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pendistribusian informasi Program PPSP di wilayah provinsi.
 - b. Advokasi Bupati/Walikota/DPRD atau pengambil keputusan lain di kabupaten/kota.
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengusulkan penggunaan dana desa untuk pembangunan sanitasi.
 - d. Menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas kepada Ketua Pokja AMPL provinsi.
 - e. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL Provinsi.
 - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja AMPL.
 - g. Melakukan tugas pemberdayaan, penguatan dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan upaya-upaya pelibatan masyarakat dalam pembangunan penyehatan lingkungan permukiman di Provinsi Jambi.
 - h. Mengkoordinasikan sosialisasi kerja pokja dan capaian-capaian program penyehatan lingkungan di tingkat provinsi kepada masyarakat Provinsi Jambi.

- i. Mendorong peran dan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan penyehatan lingkungan sehat.
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi
- a. Pemantauan pelaksanaan program sanitasi regional.
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program PPSP di provinsi serta updating secara reguler melalui NAWASIS dan merumuskan umpan balik dari hasil NAWASIS baik ke Pusat, provinsi maupun ke kabupaten/kota.
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program PPSP di kabupaten/kota.
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kabupaten/kota.
 - e. Menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja AMPL.
 - f. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pemantauan dan evaluasi yang ditugaskan oleh Ketua Pokja AMPL dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja AMPL.
 - g. Melakukan dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi terkait capaian program pembangunan Air Minum dan penyehatan lingkungan di tingkat provinsi.
 - h. Memberikan masukan dan analisis hasil berdasarkan temuan atau laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang terkait program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan sejenisnya. atau program sejenis.
 - i. Memberikan input untuk mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Air Minum dan penyehatan lingkungan di tingkat Provinsi Jambi.
 - j. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.



8. Kegiatan BLUD

1. BLUD merupakan unit melaksanakan teknis dinas / badan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat dibidang penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan yang dikelola dengan prinsip efisiensi dan produktifitas sehingga harus dikelola dengan professional.
2. Untuk Provinsi Jambi terdapat 3 BULD yang sudah berjalan,yaitu RSUD raden Mattaher Provinsi Jambi, RSJ daerah Provinsi Jambi, Labkesda Provinsi Jambi. Akan tetapi yang tidak menerapkan system BULD murni baru RSUD raden Mattaher Provinsi Jambi dan Labkesda Provinsi Jambi, sedangkan RSJ Provinsi Jambi belum sepenuhnya karena sebagian pengelolaan keuangan masih mengikuti mekanisme APBD.
3. Pembinaan BULD oleh OPD teknis belum optimal dikarenakan belum dibentuknya tim pembinaan yang beranggotakan stakeholder terkait sehingga berjalanya sendiri tanpa ada evaluasi dan monitoring secara berkala.

BAB 4

Penutup

Bab 4 berisi :

4.1. Kesimpulan

4.2. Rencana Tindak Lanjut

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Perekonomian pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Biro Perekonomian Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Biro Perekonomian tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 6,23 %.
- b. Persentase sector SDA pada Struktur Ekonomi
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 15,00 %
- c. Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 2,03 %.
- d. Nilai Akip Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 77,79 %.
- e. Sektor IKM Biro Perekonomian
Capaian kinerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 81,19 %.

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti :

1. Masih terbatasnya jumlah pegawai dan SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor secara lengkap guna penunjang tugas-tugas kedinasan.

3. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro perekonomian, sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat di tindak lanjuti sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada dan memberikan kompensasi yang proporsional.
2. Mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi SDM.
3. Menyusun alternatif model evaluasi Kinerja SKPD dan tentukan model yang paling efektif.
4. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi terkait.
5. Antisipatif terhadap perubahan kebijakan Pemerintah.
6. Menyesuaikan kondisi anggaran pemerintah daerah.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

RENCANA AKSI BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

TUJUAN	SASARAN	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)
		PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	4		5		6
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Akip/Predikat Akip		B
				Skor IKM Biro Perekonomian		80%
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	100%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap

			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	100%
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi				4,80%
	Persentase Sektor SDA pada Struktur Ekonomi				27%
	Perekonomian dan Pembangunan		Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan		100%
		Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentasi percepatan kebijakan masalah perekonomian	100%

			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	18 Dok
			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12 Dok
		Pengelola kebijakan koordinasi SDA		Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA	100%
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15 Dok
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10 Dok
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 Dok
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan				70%
		Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD		Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD	

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 Dok
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 Dok
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	10 Dok